



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2026



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah selesai disusun berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

Segala usul dan saran perbaikan atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sangat kami harapkan, sebagai masukan demi kesempurnaan Renja Setda Prov Kaltim pada pembahasan verifikasi Rancangan Akhir Renja 2026.

Samarinda, Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1Latar Belakang | 1 |
| 1.2Landasan Hukum | 4 |
| 1.3Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 12 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah | 12 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 71 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 107 |
| 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 110 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 184 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 205 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi | 205 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur..... | 219 |
| 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | 222 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 229 |
| BAB V PENUTUP | 301 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|-----|
| Tabel 2. 1..... | 13 |
| Tabel 2. 2..... | 72 |
| Tabel 2. 3..... | 79 |
| Tabel 2. 4..... | 108 |
| Tabel 2. 5..... | 112 |
| Tabel 2. 6..... | 184 |
| Tabel 3. 1..... | 207 |
| Tabel 3. 2..... | 220 |
| Tabel 4. 1..... | 230 |

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis tiga tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan.

Tahapan penyusunan RENJA Perangkat Daerah, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur tahun 2024, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Lebih luas lagi diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran bagaimana mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerja sama, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro POD, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro PBJ, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi RENJA Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2026 sesuai prioritas Pembangunan Kalimantan Timur, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahapan ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun RENJA Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai RENJA untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RENJA Sekretariat Daerah. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif.
Rancangan akhir RENJA Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi RENJA Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
24. Surat Edaran Pj. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 007.2.4/0136/Bapp-II Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
 25. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.7.2/318/B.Adpim.I/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang urusan pemerintahan yang bersifat penunjang, khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pemberian pelayanan administratif, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rancangan RKPD Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2025.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027.
3. Menetapkan rencana target kinerja dan pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
5. Menyediakan instrumen untuk evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan tersusunnya RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2026 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA Sekretariat Daerah, proses penyusunan RENJA

Sekretariat dan keterkaitan antara RENJA Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal

(SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Menjelaskan uraian Tugas, Fungsi dan diagram struktur Sekretariat Daerah

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Menjelaskan permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Sekretariat Daerah.

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.

2.6 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan

isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2026.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisi rencana kerja dan pendanaan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2026.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam RENJA tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar lebih memudahkan dalam memahaminya evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, dituangkan ke dalam Tabel 2.1 berisi evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 4 01 01 1 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4 01 01 1 03 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4 01 01 1 05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 9 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 100,00 % | 9 Paket | 9 Paket | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 05 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4 01 01 1 05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 145 Orang | 125 Orang / Bulan | 175 Orang / Bulan | 175 Orang / Bulan | 100,00 % | 30 Orang / Bulan | 30 Orang / Bulan | 100% |
| 4 01 01 1 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4 01 01 1 06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 5 Paket | 5 Paket | 100,00 % | 7 Paket | 7 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 8 Paket | 8 Paket | 100,00 % | 8 Paket | 8 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 225 Paket | 225 Paket | 210 Paket | 210 Paket | 100,00 % | 219 Paket | 219 Paket | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 14 Paket | 14 Paket | 16 Paket | 16 Paket | 100,00 % | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 1850 Laporan | 1920 Orang / Perjalanan | 2340 Orang / Perjalanan | 2340 Orang / Perjalanan | 100,00 % | 2209 Orang / Perjalanan | 2209 Orang / Perjalanan | 100% |
| 4 01 01 1 06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4 01 01 1 06 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00 % | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4 01 01 1 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 07 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 15 Unit | 111 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100,00 % | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 15 Unit | - | 18 Unit | 18 Unit | 100,00 % | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 330 Unit | - | - | - | - | 200 Unit | 200 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 150 Unit | 150 Unit | 766 Unit | 766 Unit | 100,00 % | 299 Unit | 299 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4 01 01 1 08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 % | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66 Unit | - | - | - | - | 22 Unit | 22 Unit | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 222 Unit | 80 Unit | 273 Unit | 273 Unit | 100,00 % | 211 Unit | 211 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 550 Unit | 447 Unit | 920 Unit | 920 Unit | 100,00 % | 685 Unit | 685 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 100,00 % | 13 Unit | 13 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 325 Unit | 325 Unit | 340 Unit | 340 Unit | 100,00 % | 2602 Unit | 2602 Unit | 100% |
| 4 01 01 1 11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 75 Persen | 75,00% | 100 Persen | 100 Persen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang / Bulan | 1 Orang / Bulan | 0 Orang / Bulan | 0,00% | 2 Orang / Bulan | 2 Orang / Bulan | 100% |
| 4.01.01.1.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan | 8 Paket | 8 Paket | 20 Paket | 20 Paket | 100,00% | 18 Paket | 18 Paket | 100% |
| 4.01.01.1.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 8 Orang | 4 Orang | 4 Orang | 100,00% | 8 Orang | 8 Orang | 100% |
| 4.01.01.1.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 2 Orang / Bulan | 1 Orang / Bulan | 1 Orang / Bulan | 100,00% | 2 Orang / Bulan | 2 Orang / Bulan | 100% |
| 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100,00% | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 17 Paket | 15 Paket | 15 Paket | 100,00% | 19 Paket | 19 Paket | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD | 12 Laporan | 9 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 33 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum | 100% | 100%% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 01 1 05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 12 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 1 Orang | 50 | 2 Orang | 5 Orang | 100% |
| 4 01 01 1 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 01 1 06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 50 Paket | 12 | 101 Paket | 97 Paket | 96 | 30 Paket | 139 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 7 Paket | 12 | 15 Paket | 15 Paket | 100 | 5 Paket | 32 Paket | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | - | 30 Unit | 30 Unit | 100 | 28 Unit | 58 Unit | 100% |
| 4 01 05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Persentase rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum yang difasilitasi | 100% | 98,81% | 100% | 103% | 103% | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 05 1 01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah | 100% | 100% | 100% | 103% | 103% | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 05 1 01 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun | 80 Dokumen | 67 | 90 Dokumen | 68 Dokumen | 76 | 35 Dokumen | 170 Dokumen | 100% |
| 4 01 05 1 01 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah produk hukum penetapan yang disusun | 750 Dokumen | 901 | 750 Dokumen | 741 Dokumen | 99 | 500 Dokumen | 2142 Dokumen | 100% |
| 4 01 05 1 01 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya | 800 Dokumen | 968 | 700 Dokumen | 809 Dokumen | 116 | 600 Dokumen | 2377 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota | Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi | 350 Dokumen | 359 | 400 Dokumen | 382 Dokumen | 96 | 350 Dokumen | 1091 Dokumen | 100% |
| 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah masalah hukum yang diselesaikan | 10 Perkara | 12 | 10 Perkara | 10 Perkara | 100 | 10 Perkara | 32 Perkara | 100% |
| 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan | 5 Kasus | 12 | 25 Kasus | 25 Kasus | 100 | 5 Kasus | 42 Kasus | 100% |
| BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | | | | | | | | | | |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi | 97 | 84 | 85 | 100 | 118 | 100 | 85 | 88 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|----|-----|-----|----|----|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | | | |
| | | Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 | 9 | 2 | 9 | 450 | 9 | 2 | 22 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja lingkup Setda | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 50 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 12 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 25 | 25 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen administrasi keuangan ASN | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 5 | 42 |
| 4 | 01 | 01 | 1 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 25 | 25 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Laporan hasil pendidikan dan pelatihan | 4 | 4 | 4 | 2 | 50 | 4 | 2 | 50 |
| 4 01 01 1 05 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda | 2 | 2 | 2 | 16 | 800 | 2 | 1 | 50 |
| 4 01 01 1 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 01 01 1 06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor | 12 | 12 | 12 | 150 | 1250 | 12 | 5 | 42 |
| 4 01 01 1 06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan | 12 | 12 | 15 | 50 | 333 | 12 | 6 | 50 |
| 4 01 01 1 06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi | 160 | 160 | 160 | 15 | 9 | 160 | 70 | 44 |
| 4 01 01 1 06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan | 627 | 627 | 1000 | 150 | 15 | 627 | 450 | 72 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 01 01 1 07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 5 | 5 | 5 | 60 | 1200 | 5 | 2 | 40 |
| 4 01 01 1 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 01 01 1 09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara | 15 | 15 | 15 | 12 | 80 | 15 | 6 | 40 |
| 4 01 01 1 09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 5 | 42 |
| 4 01 01 1 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 1 14 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 50 |
| 4 01 01 1 14 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 |
| 4 01 01 1 14 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah dokumen administrasi keprotokolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 |
| Biro Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | |
| 1 7 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100% | Level 3 | Level 3 | 100% |
| | | Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia | 40% | - | 30% | 40% | 133% | 35% | 35% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.7.1 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | 4 | - | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 1.7.1 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.1 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.1 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.2 | Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.2 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.2 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.7.1.02.3 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.1.03 | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan | 4 | | | | | 4 | 4 | 100% |
| 1.7.1.03.1 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 250 | 200 | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% |
| 1.7.1.03.2 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.7.1.03.3 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 80 | - | 71 | 81 | 114% | 78 | 85 | 109% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.1.1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan | 90 | - | - | - | - | 85 | 91 | 107% |
| 1.1.1.02 | Penyediaan admnisitrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.1.1.02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1.1.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 70 | - | 50 | 60 | 120% | 60 | 60 | 100% |
| 1.1.1.05 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | - | - |
| 1.1.1.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.1.5.1.0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 | 12 | 11 | 11 | 100% | 20 | - | - |
| 1.1.6 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan | 86 | - | 80 | 80 | 100% | 83 | 83 | 100% |
| 1.1.6.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 1.1.6.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 2 | 2 | 2 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1.1.6.1.0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 40 | 20 | 20 | 20 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| 1.1.7 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase prasarana kantor yang terpenuhi | 90 | - | 85 | 85 | 100% | 88 | 88 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.1.1.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 | 100% | 126 | 126 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| 1.1.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningatnya pelayanan Administarsi Umum | 86 | - | 80 | 80 | 100% | 83 | 83 | 100% |
| 1.1.1.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1.1.1.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1.1.1.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 1.1.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 86 | - | 80 | 80 | 100% | 83 | 83 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|--|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.1.1.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1.1.1.09.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 1.1.1.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 | 50 | 40 | 40 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 90 | 82 | 85% | 85% | 100% | 87% | 87% | 100% |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan | 95% | 98% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 | 12 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 6 Orang | 7 Orang | 7 Orang | 100% | 7 | 7 | 100% |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 | 12 | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Daerah | Daerah dalam kondisi Baik | | | | | | | | |
| 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | 9 Unit | 9 Unit | 9 Unit | 100% | 9 | 9 | 100% |
| 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 | 12 | 100% |
| 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Persentase Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah | - | 90% | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase Pengendalian Penerapan SPM | - | 100% | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | - | 90% | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Konsultasi dibidang Pemerintahan | | | | | | | | |
| 4.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentasan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% |
| 4.01.03.1.02.01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 4.01.03.1.02.02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 3 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 | 4 | 133% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| 4.01.03.1.02.03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 | 3 | 100% | |
| 4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4.01.03.1.03.01 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | 30 | 1 Laporan | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% | 30 | 30 | 100% | |
| 4.01.03.1.03.02 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | 20 | 1 Laporan | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100% | 20 | 20 | 100% | |
| 4.01.03.1.03.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama | 3 | 1 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 | 3 | 100% | |
| Biro Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | - | 84 | 100 | 86.59 | 86,59 | 100 Indeks | - | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 01 | | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,6 | 97,6% |
| 4 01 01 1 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan | 95 | 90% | 93,00% | 93,00% | 100 | 94% | 92% | 92% |
| 4 01 01 1 02 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 4 01 01 1 02 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100% | 84% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 4 01 01 1 05 11 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- | 4 Orang | 2 Orang | 4 orang | 4 orang | 100 | 4 Orang | 4 Orang | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Undangan | | | | | | | | |
| 4 01 01 1 06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 4 01 01 1 06 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 Paket | - | 6 Paket | 6 Paket | 100 | 6 Paket | 4 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | - | 12 Paket | 12 Paket | 100 | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| 4 01 01 1 06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Laporan | 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4 01 01 1 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 4 01 01 1 08 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | 17 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | - | - | - |
| 4.01.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 90 | 90 | 100 | 100% | 100% |
| 4.01.01.1.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 10 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 100 | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| 4.01.01.1.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 20 Unit | 18 Unit | 18 Unit | 100 | 18 Unit | 18 Unit | 100% |
| 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 97% | 97,22 | 90% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 01 04 | | Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 04 1 01 | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 04 1 01 01 | Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 250 Unit | 100 Unit | 100 Lembaga | 232 Lembaga | 232 | 250 Unit | 196 Unit | 78,4% |
| 4 01 04 1 01 02 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 100 | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 100% |
| 4 01 04 1 02 | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 4 01 04 1 02 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan | 4 Dokumen | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | 1 | 02 | 02 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 4 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4 | 01 | 04 | 1 | 02 | 03 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 4 Dokumen | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4 | 01 | 04 | 1 | 03 | | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 98 | 100% | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.04.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 4 Dokumen | 13 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4.01.04.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 4 Dokumen | 20 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.04.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 4 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10 Dokumen | 83 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan | - | 85,86 | - | - | - | - | 86 | - |
| | | Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan | 85 | - | 85 | 97,38 | 114,56 | 85 | 182 | 215 |
| 1.1.1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 1.1.1.03.4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| 1.1.1.06 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 1.1.1.06.3 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 50 | 53 | 50 | 50 | 100 | 50 | 153 | 306 |
| 1.1.1.05.9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 | 22 | 10 | 10 | 100 | 10 | 42 | 280,00 |
| 1.1.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 30 | 200,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|--------|----|-----|--------|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | | |
| 1 | 1.06 | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 82 | 100 | 80 | 100 | 125 | 80 | 280 | 341,46 |
| 1 | 1.06 | 2 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| 1 | 1.06 | 5 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 12 | 1200 |
| 1 | 1.06 | 9 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 4 | 15 | 4 | 4 | 100 | 4 | 23 | 575 |
| 1 | 1.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang | 92 | 100 | 90 | 100 | 111,11 | 92 | 292 | 317,39 |
| 1 | 1.07 | 6 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 | 84 | 10 | 10 | 100 | 10 | 104 | 1040 |
| 1 | 1.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 85 | 100 | 85 | 100 | 117,65 | 85 | 285 | 335,29 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | |
|------|--|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|-----|--------|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | |
| | | Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 12 | 1 | 12 | 1200 | 1 | 25 | 2500 |
| 1 | 1.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 12 | 1 | 12 | 100 | 1 | 25 | 2500 |
| 1 | 1.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 12 | 1 | 12 | 100 | 1 | 25 | 2500 |
| 1 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan) | 85 | 100 | 85 | 100 | 117,65 | 85 | 285 | 335,29 |
| 1 | 1.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | 4 | 200 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | |
| 1 | 1.09 | 2 | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | 4 | 2 | 4 | 200,00 | 2 | 10 | 3,333,333,333 |
| 1 | 1.09 | 6 | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 | 30 | 20 | 30 | 150,00 | 20 | 80 | 400 |
| 1 | 8 | | | | | | | | | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah | 85 | - | - | - | 0 | 85 | 85 | 100,00 |
| | | Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | - |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan | - | 90 | 80 | 90 | 112,5 | 0 | 180 | - |
| 8 | 1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 85 | 83,3 | 80 | 83,3 | 104,13 | 85 | 251,6 | 296,00 |
| | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 85 | - | - | - | - | 85 | 85 | 100,00 |
| 8 | 1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 | 6 | 6 | 6 | 100 | 4 | 16 | 400 |
| 8 | 1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 4 | 12 | 6 | 12 | 200 | 4 | 28 | 700 |
| 18 | 1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 18 | 300 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Wilayah | Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III | | | | | | | | |
| 8 | 1.0 2 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 85 | 100 | 80 | 100 | 125 | 80 | 280 | 329,412 |
| 8 | 1.0 2 | 1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| 8 | 1.0 2 | 2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| 8 | 1.0 2 | 3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| Biro Organisasi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi | 84 | - | 82 | 77,45 | 94,45 | 83 | 85 | 102.41 |
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran | 100 | - | 100 | 73,74 | 73,74 | 100 | 75 | 75.00 |
| 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 12 | 100.00 |
| 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |
| 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 12 | 100.00 |
| 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket) | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | 1 | 3 | 12 | 400,00 | 0 | 3 | 0.00 |
| 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 95 | | 90 | 67,53 | 75,03 | 92 | 95 | 103.26 |
| 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | 4 | 6 | 4 | 66,67 | 3 | 3 | 100.00 |
| 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 7 | 7 | 100.00 |
| 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan BMD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |
| 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 15 | 15 | 17 | 17 | 100,00 | 81 | 17 | 20.99 |
| 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 12 | 12 | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 12 | 0.00 |
| 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |
| 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 18 | 18 | 11 | 11 | 100,00 | 9 | 9 | 100.00 |
| 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 | 21 | 13 | 12 | 92,31 | 12 | 12 | 100.00 |
| 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Indeks Kelembagaan | 74 | 88,48 | 72 | 88,217 | 122,52 | 73 | 74 | 101.37 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | 47 | 48,68 | 44 | 47,13 | 107,11 | 45 | 47 | 104.44 |
| | | Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) | 3 | 0 | 1 | 4 | 400,00 | 5 | 4 | 80.00 |
| | | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) | 89 | 59,46 | 40 | 81,08 | 202,70 | 60 | 89 | 148.33 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) | 100 | 87,06 | 86 | 86,11 | 100,13 | 87 | 100 | 114.94 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada Evaluasi Kematangan | 63,00 | 56,41 | 0 | 61,54 | 0.00 | 65.00 | 65 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|--------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan. | 92,00 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 |
| | | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) | 82,00 | 59,46 | 82.00 | 83.78 | 102.17 | 82.00 | 82 | 100.00 |
| 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100.00 |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,00 | 40 | 40 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Penilaian Kematangan Organisasi | | | | | | | | |
| 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 90 | 90 | 100.00 |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan | 100 | 100 | 90 | 87,93 | 97,70 | 100 | 100 | 100.00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.00 |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.00 |
| 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 3 | | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 3 | 100.00 |
| 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah | 1 | | 1 | 1 | 100,00 | 3 | 1 | 33.33 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Mikro | Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | n | n | | | | |
| 0410612 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | 1 Laporan | 1 laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 04106121 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 6 Dokumen | 3 laporan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| 04106122 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 2 laporan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 04106123 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 2 Dokumen | 2 laporan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 0410613 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | 1 Laporan | 1 laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 400610000 | Koordinasi, | Jumlah Laporan | 10 | 1 laporan | 10 | 10 | 100% | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Kepegawaian pada Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 41011505 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25 Dokumen | 24 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100% | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100% |
| 41011509 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 14 orang | 3 Orang | 3 Orang | 100% | 3 Orang | 3 Orang | 100% |
| 41011502 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 45 paket | - | 41 paket | 41 paket | 100% | - | - | 100% |
| 410116 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% |
| 41011602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 paket | 10 paket | 50 paket | 50 paket | 100% | 30 paket | 30 Paket | 100% |
| 41011604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 600 paket | 25 Paket | 25 Paket | 100% | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| 41011605 | Penyediaan Barang Cetak dan | Jumlah Paket Penyediaan Barang | 2 Paket | 12 laporan | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------|--|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Penggandaan | Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | |
| 41011606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar | - | 12 Laporan | 96 Dokumen | 96 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 41011609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi | 130 Laporan | 120 OT | 120 Laporan | 120 Laporan | 100% | 130 Laporan | 130 Laporan | 100% |
| 410118 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41011801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 120 lembar | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 41011804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | - | 12 dokumen | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | - | - | - |
| 410117 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41011705 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | - | - | 5 paket | 4 paket | 80% | 1 paket | 1 paket | 80% |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Akhir Periode Renstra PD (sampai dengan 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) | | | Target program/kegiatan /Sub kegiatan (Renja PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------|---|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun (2024) | Realisasi Renja PD Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 41011706 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan | 15 Unit | 1 Laporan | 14 Unit | 14 Unit | 100% | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| 410119 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41011902 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 unit | 1 unit | 2 unit | 1 unit | 50% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 41011906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 25 unit | 12 laporan | 25 unit | 25 unit | 100% | 25 unit | 25 unit | 100% |
| 41011908 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 dirumuskan dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan administratif, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah. Perumusan tujuan strategis ini diselaraskan dengan misi pembangunan daerah serta arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026. Adapun Tujuan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 antara lain:

1. Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK.
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan konsistensi, koherensi, dan rasionalitas kebijakan yang dihasilkan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas koordinasi kebijakan antar perangkat daerah, optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis, digunakan sejumlah indikator kinerja utama seperti Indeks Kualitas Kebijakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah. Indikator tersebut mencerminkan kualitas perumusan kebijakan, efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan, serta tingkat kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, kinerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing. Adapun gambaran indikator kinerja yang tercantum dalam tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Indeks Kelembagaan | 71.53 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 88.48 | 88.22 | 89.00 | <p>Secara umum, capaian indeks kelembagaan Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori sangat baik karena nilainya mendekati angka maksimal 100. Namun, bila dibandingkan antar tahun, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,26 poin dari tahun 2023 ke 2024.</p> <p>Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat perangkat daerah yang belum melakukan pemenuhan variabel penilaian sesuai dengan Indeks Kelembagaan. 2. Bukti dukung yang tidak lengkap atau belum sesuai standar sehingga memengaruhi validitas penilaian. 3. Kurangnya pemahaman teknis dari perangkat daerah mengenai dimensi-dimensi yang menjadi indikator penilaian, sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018. <p>Meskipun capaian indeks kelembagaan Prov. Kaltim masih berada dalam kategori sangat baik, adanya penurunan nilai menunjukkan perlunya komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melengkapi variabel dan bukti dukung. Dengan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>penguatan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan oleh Biro Organisasi, diharapkan capaian tahun berikutnya dapat meningkat dan menjaga tren positif dalam penguatan tata kelola kelembagaan.</p> |
| 2 | Indeks Kematangan Organisasi | 43.59 | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 48.68 | 47.43 | 48.00 | <p>Capaian indeks menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,25 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya variabel yang belum terpenuhi secara optimal sehingga memengaruhi rata-rata nilai indeks.</p> <p>Dari 11 variabel penilaian, terdapat 4 variabel yang rata-rata nilainya masih berada pada Tingkat III (tiga), yaitu: Variabel III: Penjamin Mutu Layanan (3,87) → Masih rendahnya implementasi sistem penjaminan mutu pada proses penyelenggaraan layanan publik. Variabel V: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (3,94) → Keterbatasan pelaksanaan diklat yang terarah dan berkelanjutan bagi aparatur sehingga kompetensi ASN belum meningkat optimal. Variabel VI: Analisis Kebijakan (3,96) → Belum optimalnya kapasitas perangkat daerah dalam melakukan kajian dan analisis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Variabel VIII: Manajemen Risiko (3,85)</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|--|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>→ Penerapan manajemen risiko belum menyeluruh, masih terbatas pada unit tertentu, serta kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam mitigasi risiko kelembagaan.</p> <p>Walaupun capaian indeks mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, pencapaian target tahun 2025 sebesar 48,00 poin masih sangat memungkinkan dengan strategi perbaikan yang tepat. Fokus pada penguatan empat variabel kunci di atas menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan indeks kematangan organisasi di Provinsi Kalimantan Timur.</p> |
| 3 | Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapatkan nilai AKIP predikat Minimal A (memuaskan) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | <p>Pada tahun 2024, jumlah Perangkat Daerah klaster utama yang memperoleh predikat A (Memuaskan) sebanyak 4 perangkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, meskipun jumlah tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan total perangkat daerah yang seharusnya mampu mencapai predikat serupa. Faktor penyebab belum optimalnya capaian tersebut antara lain:</p> <p>Komitmen Pimpinan Sebagian besar pimpinan perangkat daerah belum maksimal dalam memberikan teladan akuntabilitas dan kinerja. Kurangnya keteladanan membuat budaya kerja berbasis kinerja sulit terbangun secara menyeluruh.</p> <p>Penerapan Reward dan Punishment</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>Belum konsisten dalam pemberian penghargaan maupun sanksi berdasarkan capaian kinerja organisasi maupun individu, sehingga motivasi kerja tidak merata.</p> <p>Budaya Transparansi dan Akuntabilitas Minimnya konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi menyebabkan pegawai di bawah pimpinan cenderung tidak memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga akuntabilitas.</p> <p>Kepemimpinan yang Kurang Efektif Lemahnya koordinasi antar unit kerja mengakibatkan kinerja organisasi tidak berjalan optimal. Kepemimpinan yang tidak efektif turut menghambat pencapaian predikat AKIP yang lebih tinggi.</p> <p>Capaian 4 perangkat daerah dengan predikat A (Memuaskan) di tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan, namun jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan. Kunci perbaikan ada pada komitmen pimpinan, penerapan reward & punishment, budaya akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi. Dengan upaya konsisten, target peningkatan jumlah perangkat daerah berpredikat A dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang.</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|---|-------------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh predikat minimal BB (sangat baik) | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 59.46 | 81.08 | 82.00 | <p>Tahun 2023: 59,46% atau setara dengan 22 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal BB (Sangat Baik).</p> <p>Tahun 2024: meningkat signifikan menjadi 81,08% atau 30 Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal BB.</p> <p>Peningkatan sebesar 21,62% atau tambahan 8 perangkat daerah menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Meskipun capaian meningkat, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu: Kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome), sehingga masih terfokus pada output/aktivitas. Indikator kinerja yang ditetapkan beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).</p> <p>Lemahnya keterkaitan dalam penjenjangan kinerja (cascading) dari level provinsi ke perangkat daerah hingga unit kerja.</p> <p>Belum konsisten dalam pengukuran, perjanjian kinerja, monitoring capaian, dan pelaporan kinerja, sehingga memengaruhi kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan.</p> <p>Peningkatan signifikan dari 59,46% (2023) menjadi 81,08% (2024) menunjukkan adanya komitmen kuat dalam</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek orientasi outcome, indikator kinerja yang SMART, serta konsistensi dalam cascading dan monitoring. Dengan strategi perbaikan yang dijalankan, target peningkatan kualitas SAKIP di tahun mendatang semakin realistis untuk dicapai. |
| 5 | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) | 0.00 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 87.06 | 95.69 | 96.00 | <p>Terjadi peningkatan signifikan sebesar 8,63% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik sehingga memperoleh nilai IKM di atas 80 (predikat B).</p> <p>Meskipun capaian IKM sangat baik, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar target 2025 dapat tercapai, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar pelayanan pada beberapa unit layanan belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan. 2. Konsistensi penerapan standar pelayanan masih lemah, sehingga terdapat perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. 3. Pelayanan di luar SOP masih terjadi, menandakan lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|---|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>4. Inovasi pelayanan belum optimal, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.</p> <p>5. Tindak lanjut pengaduan masyarakat belum berjalan maksimal, menyebabkan persepsi masyarakat terhadap responsivitas layanan masih beragam.</p> <p>6. Sarana dan prasarana penunjang layanan di beberapa unit masih terbatas, berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas layanan publik.</p> <p>Capaian IKM di atas 80 (B) yang meningkat dari 87,06% (2023) menjadi 95,69% (2024) menunjukkan kinerja pelayanan publik Pemprov Kaltim sudah sangat baik dan mendekati target 2025 sebesar 96%. Namun, untuk memastikan capaian tersebut berkelanjutan, perlu penguatan pada konsistensi penerapan standar pelayanan, optimalisasi inovasi, responsif terhadap pengaduan, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.</p> |
| 6 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 4.35 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 38.72 | 43,49 | 45,66 | penguatan tata kelola pengadaan dengan metode kompetitif sudah berjalan efektif. Kenaikan signifikan setiap tahun mengindikasikan peningkatan transparansi, efisiensi, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemprov Kaltim. |
| 7 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 63.00 | 69.00 | 75.00 | 75.00 | 73,41 | 88,96 | 89,85 | Pencapaian ini menggambarkan peningkatan signifikan efektivitas belanja pemerintah daerah melalui mekanisme pengadaan. Kinerja |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|--|-------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | melampaui target menandakan adanya konsistensi dalam mengarahkan belanja publik agar sesuai prinsip value for money serta akuntabilitas. |
| 8 | peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | 0.00 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 143,07 | 21,63 | 22,71 | Walaupun sempat melonjak tinggi pada 2023 karena kemungkinan adanya kebijakan afirmasi atau proyek besar berbasis PDN/UMK, capaian pada 2024 lebih realistis dan stabil. Tren capaian tetap konsisten melampaui target. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam mendukung keberpihakan pada produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. |

Sumber Data: IKK Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, dapat dilihat arah perkembangan kinerja Sekretariat Daerah dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk melengkapi gambaran kinerja secara menyeluruh, pada bagian berikutnya disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pencapaian tujuan strategis Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|---------------------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Analisis Capaian Indikator Persentase |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>Perumusan Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kebijakan yang direncanakan telah difasilitasi sesuai dengan program kerja tahunan. Capaian ini mengindikasikan adanya konsistensi pelaksanaan program, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta dukungan faktor pendukung yang memadai. Keberhasilan ini juga mencerminkan meningkatnya peran Biro/Bagian terkait dalam mengawal proses perumusan kebijakan bidang kesejahteraan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>n rakyat sehingga berdampak positif terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Faktor Pendorong</p> <p>Tersedianya anggaran yang cukup mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga perumusan kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan finansial.</p> <p>Regulasi yang jelas menjadi pedoman bagi pelaksanaan program sehingga arah kebijakan lebih terukur dan terarah.</p> <p>Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sub Bagian yang disusun dengan baik menjadi acuan kerja yang</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>sistematis.</p> <p>Ketersediaan SDM yang memadai memungkinkan pelaksanaan fasilitasi berjalan sesuai target.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>Masih terdapat ketidakpatuhan dalam melaksanakan RKT, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau inkonsistensi meskipun capaian tetap 100%.</p> <p>Keterbatasan kemampuan SDM dalam penyusunan perencanaan kegiatan membuat kualitas perencanaan belum optimal.</p> <p>Keterbatasan SDM dalam penyusunan output dan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | outcome berpotensi menurunkan kualitas hasil meskipun target kuantitatif tercapai. |
| 2 | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Analisis Capaian Indikator Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukkan Seluruh pemerintah daerah yang wajib menyusun LPPD telah difasilitasi dalam proses penyusunan/penyampaian laporannya.</p> <p>Faktor pendorong Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi LPPD menjadi prioritas. Koordinasi yang Efektif dengan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>faktor penghambat Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.</p> |
| 3 | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Analisis Capaian Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukkan seluruh kebijakan daerah yang menjadi sasaran fasilitasi telah didampingi</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>sesuai ketentuan</p> <p>Faktor pendorong Dukungan penuh dari pimpinan instansi/pemerintah daerah sehingga fasilitasi menjadi prioritas. Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>faktor penghambat Adanya revisi aturan teknis secara mendadak yang membutuhkan waktu penyesuaian. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.</p> |
| 4 | Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Analisis Capaian Persentase Kerja Sama Daerah</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>Yang Difasilitasi mencapai hasil 100%, menunjukkan seluruh usulan kerja sama daerah yang menjadi sasaran telah memperoleh fasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku .</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan terhadap fasilitasi kerja sama daerah menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah Koordinasi yang Efektif dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota Dukungan Anggaran dan Sarana dengan tersedia dana dan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>fasilitas untuk pendampingan, sosialisasi, dan evaluasi kerja sama</p> <p>faktor penghambat Proses fasilitasi kadang terkendala oleh perbedaan agenda antar pihak yang bekerja sama.. Ketersediaan SDM yang kompeten dalam fasilitasi.</p> |
| 5 | Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,59 | 100,00 | 100,00 | <p>Analisis Capaian Indikator Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM mencapai hasil 100%, menunjukkan seluruh rancangan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/di evaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM telah memperoleh fasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan terhadap rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/di evaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAMh menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan daerah Koordinasi yang Efektif</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>dengan adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota</p> <p>Tersedianya Anggaran Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin</p> <p>faktor penghambat</p> <p>Judul Rapergub/Raperda tidak dapat ditindaklanjuti</p> <p>Kurang memadai alat bukti</p> |
| 6 | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Analisis</p> <p>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi mencapai hasil 100%,</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>menunjukkan seluruh eluruh target kebijakan daerah di bidang perekonomian yang menjadi sasaran telah mendapatkan fasilitasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <p>Faktor pendorong Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Teknis yang jelas, sehingga proses fasilitasi lebih terarah Dukungan Anggaran dan Sarana yang memadai untuk penyusunan dan asistensi kebijakan</p> <p>faktor penghambat Variasi Kondisi Wilayah dan Potensi Ekonomi yang berbeda</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---|-------------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | antar daerah sehingga membutuhkan pendekatan berbeda |
| 7 | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | 0,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 95,00 | <p>Analisis Indikator Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian mencapai hasil 100%,Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong kegiatan ekonomi, investasi, dan optimalisasi potensi lokal.</p> <p>Faktor pendorong Kebijakan Ekonomi Daerah yang Tepat Sasaran sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan (pertanian, pariwisata, UMKM, industri</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | lokal) Komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan bidang perekonomian faktor penghambat Fluktuasi Ekonomi Global/Nasional yang memengaruhi harga komoditas dan iklim investasi daerah. Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi menyebabkan akses transportasi, logistik, dan pasar yang belum optimal. |
| 8 | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 0,00 | 71,00 | 73,00 | 76,00 | 70,55 | 86,69 | 86,69 | Analisis Indikator Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa mencapai hasil |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>86,96, Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa di instansi telah berjalan dengan baik, dengan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang relatif tinggi</p> <p>Faktor pendorong Fasilitasi dan dukungan sistem informasi yang memudahkan SKPD untuk mendapatkan hasil pencatatan RUP penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | yang mempercepat proses dan meminimalkan intervensi manual faktor penghambat Belum terpenuhinya SDM JF PPBJ karena kewenangan terkait penambahan pegawai bukan kewenangan Biro PBJ Koordinasi Teknis yang Kompleks terutama pada pengadaan lintas unit kerja. |
| 9 | Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan | 0,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 96,63 | 95,20 | 95,20 | Analisis IndikatorTingkat Capaian Realisasi Pembangunan mencapai hasil 95,20, Capaian |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai secara penuh</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program prioritas Perencanaan yang Matang melalui sinkronisasi RKPD, Renja, dan penganggaran</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---|-------------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | faktor penghambat Belum tertibnya administrasi pelaksanaan Pembangunan (Dokumen administrasi teknis) Keterlambatan Proses Pengadaan yang menyebabkan realisasi tidak optimal |
| 10 | Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 97,30 | 81,08 | 81,08 | Analisis Indikator Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB mencapai hasil 81.08, Capaian ini menunjukkan |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>bahwa sebagian besar perangkat daerah telah mampu menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dengan baik, meskipun masih terdapat perangkat daerah yang perlu ditingkatkan kualitasnya</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan Daerah untuk memperkuat penerapan SAKIP Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | kinerja. faktor penghambat Belum seluruh PD menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektoral Variasi Kapasitas SDM antar perangkat daerah yang tidak merata dalam pemahaman SAKIP |
| 11 | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | 0,00 | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 84,26 | 86,40 | 86,40 | Analisis Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah mencapai hasil 84,26, Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>besar pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan Standar Pelayanan yang Jelas sesuai regulasi dan SOP</p> <p>faktor penghambat Variasi Ekspektasi Pengguna sebagian pengguna masih memiliki standar kepuasan yang berbeda-</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | beda. Tingginya Mobilitas Pelayanan khususnya pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah khususnya tamu-tamu Pimpinan yang tidak terencana atau tidak terprediksi |
| 12 | Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 0,00 | 81,80 | 81,80 | Analisis Indikator Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencapai hasil 81.08, Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan prinsip akuntabilitas |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>dengan cukup konsisten. Komitmen Pimpinan Daerah untuk memperkuat penerapan SAKIP</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan Daerah dalam memperkuat penerapan SAKIP Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Teknis yang jelas terkait manajemen kinerja Pendampingan dan Monitoring dari inspektora t maupun Bagian/ Biro Organisasi.</p> <p>faktor penghamb</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|---|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | at Belum seluruh PD menindaklanjuti rekomendasi perbaikan SAKIP sesuai LHE dari Inspektoral Variasi Kapasitas SDM antar perangkat daerah yang tidak merata dalam pemahaman SAKIP Variasi Kualitas Perencanaan Kinerja antar perangkat daerah yang belum seragam |
| 13 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 0,00 | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,29 | 86,41 | 86,41 | Analisis Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah mencapai hasil 86,41, |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | <p>Capaian ini menunjukkan bahwa berarti masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan, meskipun ada aspek tertentu yang masih perlu ditingkatkan</p> <p>Faktor pendorong Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam memberikan pelayanan prima. Profesionalisme dan Responsivitas Petugas dalam memberikan layanan Standar Pelayanan yang Jelas sesuai</p> |

| No | Indikator | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|-----------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | dengan regulasi faktor penghambat Beban Layanan Tinggi di waktu tertentu sehingga menurunkan kecepatan layanan Variasi Ekspektasi Masyarakat yang berbeda-beda sehingga memengaruhi hasil survei |

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

Hasil capaian kinerja pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai/melebihi target capaian yang ditetapkan serta menjalankan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Meskipun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong keberhasilan maupun kendala yang masih dihadapi. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan yang telah dimiliki serta tantangan yang perlu

segera diatasi guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode perencanaan menunjukkan adanya berbagai faktor pendorong yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target indikator, sekaligus beberapa faktor penghambat yang perlu segera mendapatkan perhatian. Pada aspek fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, pencapaian kinerja didukung oleh tersedianya anggaran, regulasi yang jelas, rencana kerja tahunan yang telah disusun, serta dukungan sumber daya manusia. Namun demikian, masih dijumpai kendala berupa ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan rencana kerja, keterbatasan kapasitas aparatur dalam perencanaan, dan kelemahan dalam penyusunan output maupun outcome kinerja. Kondisi serupa juga terlihat pada fasilitasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana mekanisme pelaporan telah berjalan, tetapi kualitas capaian indikator kunci outcome LPPD belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan oleh regulasi terbaru.

Dalam fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama daerah, pencapaian kinerja relatif baik, meskipun masih diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan serta pedoman teknis yang lebih lengkap bagi perangkat daerah dan mitra kerja sama. Sementara itu, dalam bidang harmonisasi produk hukum dan penanganan masalah hukum serta HAM, dukungan regulasi, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran bantuan hukum menjadi faktor utama pendorong, sedangkan keterbatasan data dukung, judul rancangan peraturan yang tidak dapat ditindaklanjuti, serta alat bukti yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan.

Pada bidang perekonomian, komitmen tinggi dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan menjadi kekuatan utama, namun terdapat hambatan terkait regulasi honorarium serta belum terealisasinya sumber dana dari FCPF. Meski demikian, capaian realisasi pendapatan daerah dari hasil kebijakan ekonomi relatif tidak menemui kendala berarti berkat adanya kemitraan kuat antara pemerintah daerah, BUMD, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, pada

aspek pengadaan barang dan jasa, dukungan sistem informasi, tambahan SDM melalui mekanisme PPPK, serta fasilitasi LKPP menjadi faktor penting dalam pencapaian target. Hambatan masih ditemui pada keterbatasan kemampuan SKPD dalam melakukan input RUP, keterbatasan SDM jabatan fungsional PBJ, serta proses verifikasi dan penilaian kematangan LKPP.

Demikian pula pada capaian realisasi pembangunan, dukungan anggaran, SDM yang kompeten, dan budaya kerja inovatif menjadi pendorong, namun belum tertibnya administrasi, pelaporan, serta integrasi data pembangunan antar-aplikasi masih menjadi kendala utama. Dari sisi reformasi birokrasi, sebagian besar perangkat daerah telah menerapkan cascading kinerja dan memanfaatkan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring, tetapi komitmen pimpinan yang belum merata serta tindak lanjut rekomendasi perbaikan masih menjadi hambatan. Tingkat kepuasan layanan Sekretariat Daerah menunjukkan pengaruh positif dari dukungan anggaran dan pimpinan, meski kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, sinergi antar-biro, serta peningkatan kapasitas SDM, namun terkendala oleh perbedaan persepsi dalam pengisian aplikasi, seringnya pergantian operator, dan kompleksitas regulasi evaluasi SAKIP. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah cenderung meningkat berkat pelaksanaan survei secara rutin, pembaruan standar pelayanan, serta komitmen pimpinan hingga pelaksana. Akan tetapi, kesadaran ASN maupun non-ASN untuk mendorong pengguna layanan mengisi kuesioner masih rendah, dan pelaporan hasil survei belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem aplikasi.

Secara keseluruhan, analisis faktor pendorong menunjukkan bahwa dukungan regulasi, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan, serta penguatan sistem informasi menjadi modal penting dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Sementara itu, faktor penghambat utama lebih banyak terkait dengan keterbatasan kapasitas

SDM, ketidakpatuhan terhadap rencana kerja, lemahnya pengelolaan data dan dokumen pendukung, serta belum optimalnya integrasi aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan berupa peningkatan kompetensi SDM, penguatan komitmen pimpinan, integrasi sistem informasi, serta penegakan disiplin dalam pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan target kinerja dapat tercapai secara konsisten

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu mencapai sebagian besar target yang ditetapkan, khususnya dalam aspek fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta harmonisasi produk hukum. Capaian positif ini menunjukkan adanya dukungan regulasi, anggaran, dan perencanaan kerja tahunan yang terarah.

Namun demikian, capaian yang diperoleh belum sepenuhnya menjawab berbagai tantangan mendasar pembangunan daerah. Masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan data dukung, ketidakpatuhan dalam menjalankan rencana kerja, serta minimnya pedoman teknis yang seragam di antara perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa

indikator yang belum tercapai atau masih membutuhkan peningkatan perlu diperhatikan secara serius.

Oleh karena itu, hasil pengukuran kinerja tidak hanya menjadi gambaran pencapaian, tetapi juga menjadi bahan evaluasi penting untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut kemudian dipilah menurut masalah pokok, masalah, dan akar masalah agar dapat dirumuskan langkah strategis yang lebih terarah dan berkesinambungan. Rincian permasalahan pembangunan menurut urusan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4

Pemetaan Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|--|---|
| Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah | Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan | Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya |
| | | Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid |
| | | Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan |
| | | Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah |
| | Belum optimalnya target penawaran kerjasama | Kurangnya pemahaman penawaran kerjasama secara mendalam |
| Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum | Belum optimalnya pengendalian pembangunan | Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang- undangan dan produk-produk Hukum |
| | | Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya. |

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---------------|---|---|
| | Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa | Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa |
| | Belum optimalnya Penerapan SAKIP | Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja |
| | Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja |
| | Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah | Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) |

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

2.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan capaian kinerja yang telah diraih sekaligus tantangan yang masih dihadapi, Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa responsif, kreatif, dan inovatif dalam menyikapi perubahan yang terjadi, baik pada lingkup internal pemerintahan maupun dalam dinamika kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi harus disusun secara lebih komprehensif agar mampu mengantisipasi isu-isu strategis serta permasalahan mendasar yang berpotensi muncul di masa mendatang. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan yang dijalankan tidak sekadar memenuhi indikator kinerja, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan di Sekretariat Daerah perlu didasarkan pada analisis yang menyeluruh,

baik terhadap capaian pelayanan perangkat daerah serta identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi sebagai landasan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus prioritas ke depan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dirancang dapat lebih terarah, terukur, serta berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dari proses analisis tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke depan. **Pertama**, dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kualitas kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum. Hal ini berimplikasi pada belum maksimalnya dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Kedua, pada bidang perekonomian, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa, kualitas kebijakan yang ada masih memerlukan penguatan agar tata kelola pembangunan dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan di bidang ini sangat penting untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ketiga, dalam hal pelayanan publik, Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan yang berorientasi pada penerapan administrasi dan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Langkah ini menjadi sangat krusial agar pelayanan publik tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan kualitas kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan publik. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan

program dan kegiatan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan riil perangkat daerah. Oleh karenanya, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/sub kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| Biro Umum | | | | | 231.399.255.000 | | | | | 360.448.340.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum | 84,5 | 231.399.255.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum | 85 | 360.448.340.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum) | 100 % | 117.724.851.225 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum) | 100% | 129.746.035.493 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 683 Orang/Bulan | 115.441.601.813 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 683 Orang/Bulan | 127.531.930.492 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------------|---|--|---|------------|---------------|--|
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.283.249.412 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 2.214.105.001 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100 % | 1.442.898.170 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100% | 1.327.219.334 | |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 617.884.240 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 672.055.704 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik | 12 Laporan | 825.013.930 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada | Kota Samarinda, | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik | 12 Laporan | 655.163.630 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|---------------|--|--|--|-----------|---------------|--|
| | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Daerah pada SKPD | | | SKPD | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Daerah pada SKPD | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum | 100% | 3.191.567.845 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum | 100% | 3.129.732.000 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10 Paket | 842.146.845 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 9 Paket | 910.356.000 | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi | 4 Dokumen | 1.618.129.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kota Samarinda, Semua | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi | 4 Dokumen | 1.688.376.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|----------------|---|--|---|----------|----------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kepegawaian | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kepegawaian | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 175 Orang | 731.292.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 45 Orang | 531.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum | 100% | 25.474.287.205 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum | 100% | 49.663.003.086 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 6 Paket | 284.240.992 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 10 Paket | 494.919.126 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|-------------------|---|--|--|--------------|----------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des a | Kantor yang Disediakan | | | Bangunan Kantor | tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 536.473.143 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 486.242.399 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 33 Paket | 6.168.732.84 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Balikpa pan, | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 321 Paket | 21.700.320.894 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------------|---|--|---|------------|---------------|--|
| | | | | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 533.738.814 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 772.471.805 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1.507.491.676 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 4.499.307.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------------|--|--|---|------------|----------------|--|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 15.322.302.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 20.503.473.650 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 828.895.640 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 904.944.360 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis | 4 Dokumen | 292.412.100 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis | 4 Dokumen | 301.323.252 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|---------------|---|---|--|--------|----------------|--|
| | | Semua Kel/Des a | Elektronik pada SKPD | | | pada SKPD | Semua Kel/Des a Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a | Elektronik pada SKPD | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100% | 4.593.312.150 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100% | 17.645.733.849 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 342.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 6.155.453.024 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang | 1 Unit | 342.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---------------|--|--|--|----------|---------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | Disediakan | | | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 253 Unit | 2.564.487.749 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 330 Unit | 9.990.486.999 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 1.344.824.401 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 55 Unit | 1.499.793.826 | |

| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100% | 32.747.473.620 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum) | 100% | 57.563.921.014 | |
|--|---|---|--|------------|----------------|---|--|--|------------|----------------|--|
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 49.506.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 49.560.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 11.667.950.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 11.667.948.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|----------------|--|--|--|------------|----------------|--|
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.980.991.420 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 7.136.705.850 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 19.049.026.200 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 38.709.706.564 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat | 100% | 18.162.376.464 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat | 100% | 42.155.222.470 | |

| | | | Daerah (Biro Umum) | | | Daerah | | Daerah (Biro Umum) | | | |
|--|--|---|--|----------|---------------|--|--|--|----------|---------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 52 Unit | 381.102.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 66 Unit | 1.369.400.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 205 Unit | 3.014.030.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 262 Unit | 4.821.094.390 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 600 Unit | 1.275.078.864 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 250 Unit | 187.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|----------------|--|--|--|----------|----------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 unit | 13.345.815.600 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 33.585.117.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 195 Unit | 146.350.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 147 Unit | 2.192.111.080 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|--------------------|--|---|---|----------------------|----------------|--|
| | | | | | | | pan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | | | | |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 13.743.506.3 58 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 17.889.134.675 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/B ulan | 250.252.236 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/B ulan | 250.252.236 | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 189.240.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 20 Paket | 452.928.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|----------------|---|---|---|---------------|----------------|--|
| | | a | | | | | a | | | | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 870.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang | 869.040.000 | |
| | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 12.434.014.122 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 16.316.914.439 | |
| | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100% | 14.318.981.963 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100% | 41.328.338.079 | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 15 Paket | 5.942.656.457 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 15 Paket | 26.001.840.575 | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang | 20 Paket | 4.849.873.215 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 20 Paket | 11.512.130.851 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|------------------|-----------------------|---|--|--|------------------|-----------------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des a | Disediakan | | | | tan, Semua Kel/Des a | yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 23 Paket | 3.526.452.29 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 23 Paket | 3.814.366.653 | |
| Biro Administrasi Pimpinan | | | | | 16.376.897.000 | | | | | 21.418.239.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS | Kaliman tan Timur | Indeks Kualitas Layanan Keseekretarian Biro Administrasi Pimpinan | 100 Indeks | 16.376.897.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kaliman tan Timur | 1. Indeks Kualitas Layanan Keseekretarian | 81 | 21.418.239.000 | |
| | | | | | | | | 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 84% | | |
| | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90 % | 1.041.642.000 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 1.507.234.673 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokume n | 659.006.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokume n | 916.684.673 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|-----------|---------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des a | | | | | tan, Semua Kel/Des a | | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 382.636.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 590.550.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90 % | 4.115.891.182 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 179.880.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 4.115.891.182 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 179.880.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan | 90 % | 714.404.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan | 90% | 1.820.604.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|---------------|--|---|---|--|-----------|---------------|
| | | | Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | | | | | Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | | | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 309.204.000 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 673.404.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 405.200.000 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 68 Orang | 1.147.200.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 1.949.893.353 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 2.255.900.362 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 220.031.353 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 240.561.182 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------------|--|---|---|-----------|---------------|--|
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 250 Paket | 118.700.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 177.955.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | 40.362.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 40.384.180 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 1.570.800.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 1.797.000.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, | 90% | 369.219.776 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, | 90% | 369.910.186 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|-------------|---|---|--|-----------|-------------|--|
| | | | Kepegawaian dan Tata Usaha | | | | | Kepegawaian dan Tata Usaha | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 29 Unit | 369.219.776 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | 369.910.186 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 9.603.600 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha | 90% | 16.329.600 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 9.603.600 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 16.329.600 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, | 90% | 399.760.704 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, | 90% | 245.400.848 | |

| | | | Kepegawaian dan Tata Usaha | | | | | Kepegawaian dan Tata Usaha | | | |
|--|---|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 352.880.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 198.260.848 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 65 Unit | 46.880.704 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 66 Unit | 47.140.000 | |
| | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Kaliman tan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan | 100% | 6.142.581.45 6 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Kaliman tan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan | 100% | 11.529.870.845 | |
| | Penyiapan Materi Pimpinan | Semua Kota/Ka b, Semua | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 12 Dokume n | 558.383.400 | Penyiapan Materi Pimpinan | Semua Kota/Ka b, Semua | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 2 Dokume n | 596.160.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|---------------|--|--|---|--------------|---------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 2.856.379.660 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 Laporan | 5.258.967.725 | |
| | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 12 Laporan | 2.727.818.396 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 3 Laporan | 5.674.743.120 | |
| | Fasilitasi Keprotokolan | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan | 100% | 1.633.900.929 | Fasilitasi Keprotokolan | Kalimantan Timur | Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan | 100% | 3.493.108.486 | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 4 Laporan | 955.096.929 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1 Laporan | 1.352.526.605 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|------------|----------------------|--|---|--|------------|----------------------|--|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Laporan | 446.124.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Laporan | 1.152.600.000 | |
| | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2 Laporan | 232.680.000 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2 Laporan | 987.981.881 | |
| Biro Hukum | | | | | 6.244.666.000 | | | | | 3.951.487.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum | 90 % | 1.728.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 Indeks | 421.775.838 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik | 100% | 103.920.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik | 100% | 95.760.000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 103.920.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 95.760.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------------|--|---|--|------------|-------------|--|
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 7.680.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 7.680.000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 7.680.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 7.680.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah | 100% | 990.995.672 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah | 100% | 306.775.718 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 142.043.110 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 22.075.020 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 8.635.718 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Semua Kota/Kab | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 55 Laporan | 826.877.542 | Penyelenggaraan Rapat | Semua Kota/Kab | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 12 Laporan | 268.140.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|-------------|--|---|---|------------|-----------|--|
| | dan Konsultasi SKPD | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 134.693.884 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 120 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 134.693.884 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 120 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 460.762.944 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Laporan | 453.762.944 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Laporan | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------------|---|---|---|--------------|---------------|--|
| | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kantor yang Disediakan | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kantor yang Disediakan | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100% | 29.947.500 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100% | 8.560.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 29.947.500 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 8.560.000 | |
| | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Kalimantan Timur | Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum | 100% | 4.444.666.000 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Kalimantan Timur | 1. Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum 2. Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan | 100% 100% | 3.514.711.162 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Kalimantan Timur | Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah | 100% | 2.729.666.000 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Kalimantan Timur | Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah | 100% | 1.899.496.202 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | 80 Dokumen | 860.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | 80 Dokumen | 640.315.554 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|---------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des a | | | | | tan, Semua Kel/Des a | | | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | 750 Dokume n | 310.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | 750 Dokume n | 205.400.000 | |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | 800 Dokume n | 690.000.000 | Pendokumenta sian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | 800 Dokume n | 400.342.888 | |
| | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | 350 Dokume n | 869.666.000 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kot a | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | 350 Dokume n | 653.437.760 | |
| | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kaliman tan Timur | Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat | 100% | 1.715.000.00 0 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kaliman tan Timur | Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat | 100% | 1.615.214.960 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|---------------|---|---|---|-----------|---------------|--|
| | | | Peradilan | | | | | Peradilan | | | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | 10 Kasus | 1.105.000.000 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | 10 Kasus | 1.149.982.232 | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | 5 Kasus | 610.000.000 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | 5 Kasus | 465.232.728 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | - | 72.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 Indeks | 15.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah | 100% | 72.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah | 100% | 15.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 72.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|------------|----------------------|--|---|---|------------|----------------------|--|
| | | a | | | | | a | | | | |
| Biro Organisasi | | | | | 7.790.563.000 | | | | | 4.343.462.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi | 84 Indeks | 2.090.563.000, | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi | 88 Indeks | 886.478.489 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi) | 100% | 115.440.200 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi) | 100% | 103.329.510 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 115.440.200 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 103.329.510 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | 100% | 10.230.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | 100% | 3.600.000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 10.230.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 3.600.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian | Kalimantan | Persentase Administrasi | 100% | 85.217.500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---------------|--|---|---|---------|-------------|--|
| | Perangkat Daerah | Timur | Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 60.217.500, | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 25.000.000 | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi) | 95% | 1.185.674.800 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi) | 95% | 662.939.199 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 37.473.800 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 72.153.331 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Balikpapan, Semua | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 278.350.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Samarinda, Semua | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 78.089.248 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-------------|--|--|---|-----------|-------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 16.500.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 17.096.620 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 47.700.000 | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 707.250.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 495.600.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|--------------|--|---|--|--------|------------|--|
| | | Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 98.401.000 | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi) | 100% | 194.076.000, | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi) | 100% | 43.797.780 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 194.076.000, | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 43.797.780 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi) | 100% | 419.330.500 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Samarinda | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 1 Laporan | 1.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|-------------|---|---|--|---------|------------|--|
| | | da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Surat Menyurat | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 418.330.500 | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi) | 100% | 80.594.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi) | 100% | 72.812.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 81 Unit | 61.812.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 52.312.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecama tan, | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar | 21 Unit | 18.782.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecama tan, | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar | 16 Unit | 20.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|-----------|---------------|---|------------------|---|-------|---------------|--|
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Kalimantan Timur | Indeks Kematangan Organisasi | 47 Indeks | 5.700.000.000 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Kalimantan Timur | 1. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi | 63% | 3.456.983.511 | |
| | | | Indeks Kelembagaan | 74 Indeks | | | | 2. Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) | 82% | | |
| | | | | | | | | 3. Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) | 86% | | |
| | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kalimantan Timur | Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi | 100% | 2.350.000.000 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kalimantan Timur | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi | 40 PD | 1.744.304.631 | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan | 100% | | | | | | | |
| | Fasilitasi Penataan | Kota | Jumlah Dokumen | 2 | 800.000.000 | Fasilitasi | Kota | Jumlah Dokumen | 3 | 410.840.997 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------------|--|---|---|-----------|---------------|--|
| | Kelembagaan Provinsi | Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Dokumen | | Penataan Kelembagaan Provinsi | Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Dokumen | | |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 750.000.000 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 911.401.450 | |
| | Penataan Analisis Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa B | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 2 Dokumen | 800.000.000 | Penataan Analisis Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 1 Dokumen | 422.062.184 | |
| | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Kalimantan Timur | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP | 100% | 3.350.000.000 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Kalimantan Timur | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya | 40 PD | 1.712.678.880 | |

| | | | Pertriwulan | 90% | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya | 40 PD | | |
|--|---|---|--|-----------|-------------|---|---|--|---|-------------|--|--|
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 950.000.000 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 300.004.000 | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 3 Dokumen | 950.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 1 Dokumen | 341.170.330 | | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 300.000.000 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 175.000.000 | | |
| | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 1 Dokumen | 530.000.000 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 1 Dokumen | 307.336.881 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des | | | | | tan, Semua Kel/Des a | | | | |
| | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 1 Dokume n | 620.000.000 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 1 Dokume n | 589.167.669 | |
| Biro Pemerinta han dan Otonomi Daerah | | | | | 7.291.398.0 00 | | | | | 9.026.204.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kaliman tan Timur | Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 90% | 3.062.831.77 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI | Kaliman tan Timur | Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 87 Indeks | 1.337.161.880 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Realisasi Keuangan Biro POD | 95% | 140.520.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Realisasi Keuangan Biro POD | 95% | 122.400.000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD | 2 Dokume n | 140.520.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD | 2 Dokume n | 122.400.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian | Kaliman tan | Persentase Pelaporan | 100% | 42.000.000 | Administrasi Kepegawaian | Kaliman tan | Persentase Pelaporan | 100% | 17.180.100 | |

| Perangkat Daerah | Timur | Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD | | | Perangkat Daerah | Timur | Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD | | | |
|---|---|---|-----------|---------------|---|---|---|-----------|---------------|--|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 42.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 17.180.100 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD | 100% | 1.293.226.140 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD | 100% | 1.009.672.780 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 69.467.920 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 63.822.130 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 45.758.220 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 43.650.650 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Semua Kota/Kab | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 1 Laporan | 1.178.000.000 | Penyelenggaraan Rapat | Semua Kota/Kab | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 1 Laporan | 902.200.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|---------------|--|--|--|------------|-------------|--|
| | dan Konsultasi SKPD | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD | 100% | 46.695.553 | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 29 Unit | 46.695.553 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD | 100% | 1.490.890.078 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD | 100% | 123.820.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 442 Laporan | 5.091.625 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.485.798.453 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 118.820.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|-------------------|---|---|--|---------|---------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des | | | | | tan, Semua Kel/Des | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD) | 100% | 49.500.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kaliman tan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD) | 100% | 64.089.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 9.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 51.269.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 40.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarin da, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 12.820.000 | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Kaliman tan Timur | 1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100% | 4.228.566.22 9 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Kaliman tan Timur | 1. Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan | 100% | 7.689.042.120 | |
| | | | | | | | | 2. Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------------|--|---|---|-----------|---------------|--|
| | | | | | | | | 3. Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah | 100% | | |
| | | | | | | | | 4. Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan | 100% | | |
| | | | | | | | | 5. Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti | 100% | | |
| | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Kalimantan Timur | Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan | 100% | 1.119.550.130 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Kalimantan Timur | Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan | 100% | 2.687.202.120 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 718.987.850 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 2.286.329.920 | |
| | Fasilitasi Penataan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 Dokumen | 400.562.280 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 Dokumen | 400.872.200 | |
| | Pelaksanaan | Kaliman | Persentasen | 95% | 1.700.014.22 | Pelaksanaan | Kaliman | Persentase | 100% | 3.801.840.000 | |

| | Otonomi Daerah | tan Timur | Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah | | 4 | Otonomi Daerah | tan Timur | Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |
|--|--|---|---|------------|---------------|--|---|---|------------|---------------|--|
| | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 dokumen | 400.000.024 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | 417.665.000 | |
| | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 4 dokumen | 750.011.780 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 2.682.700.000 | |
| | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 dokumen | 550.002.420 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Laporan | 701.475.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100% | 1.409.001.875 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100% | 1.200.000.000 | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Semua Kota/Kab, | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang | 30 Dokumen | 559.001.875 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Semua Kota/Kab, | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang | 30 Dokumen | 623.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------------|--|
| | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Difasilitasi | | | | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Difasilitasi | | | |
| | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | 20 Dokumen | 400.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | 20 Dokumen | 239.000.000 | |
| | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | 3 Laporan | 450.000.000 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | 3 Laporan | 338.000.000 | |
| Biro Kesejahteraan Rakyat | | | | | 8.693.319.000 | | | | | 1.772.971.544.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat | 100 Indeks | 3.363.319.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 85 Indeks | 1.376.265.139 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 95% | 307.135.164 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 95% | 427.760.000 | |
| | Pelaksanaan | Semua | Jumlah Dokumen | 12 | 286.135.164 | Pelaksanaan | Semua | Jumlah Dokumen | 12 | 406.760.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|------------|-------------|--|
| | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 21.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 21.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra) | 100% | 32.178.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra) | 100% | 32.178.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 32.178.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 32.178.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra) | 12 Bulan | 1.025.995.390 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra) | 12 Bulan | 785.912.539 | |
| | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Kab | Jumlah Paket Peralatan dan | 6 Paket | 199.343.780 | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Kab | Jumlah Paket Peralatan dan | 38 Paket | 139.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------------|--|---|---|------------|-------------|--|
| | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 59.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 29.260.929 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 767.651.610 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 617.651.610 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 12 Bulan | 1.824.183.846 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|---------|-------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.804.183.846 | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 100% | 173.826.600 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) | 100% | 120.414.600 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 134.037.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 100.322.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 39.789.600 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 20.092.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------------|--|---|---|--------------|-------------------|--|
| | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kalimantan Timur | Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100% | 5.330.000.000 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kalimantan Timur | 1. Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra | 5.715 Orang | 1.771.595.278.861 | |
| | | | | | | | | 2. Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | 19.900 Orang | | |
| | | | | | | | | 3. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi | 100% | | |
| | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Kalimantan Timur | Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100% | 1.500.000.000 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Kalimantan Timur | Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | 100% | 138.185.860.000 | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 300 Unit | 800.000.000 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 300 Unit | 11.242.860.000 | |
| | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 10 Lembaga | 700.000.000 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 10 Lembaga | 126.943.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|---------------|---|---|---|-----------|-------------------|--|
| | | Kel/Desa | | | | | Kel/Desa | | | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Kalimantan Timur | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 1.700.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Kalimantan Timur | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 1.631.809.418.861 | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 4 Dokumen | 600.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 4 Dokumen | 1.631.409.418.861 | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 4 Dokumen | 550.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 4 Dokumen | 200.000.000 | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 4 Dokumen | 550.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 4 Dokumen | 200.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|---------------|--|---|--|-----------|---------------|--|
| | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Kalimantan Timur | Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 2.130.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Kalimantan Timur | Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti | 100% | 1.600.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 4 Dokumen | 736.600.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 4 Dokumen | 700.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, | 4 Dokumen | 745.600.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, | 4 Dokumen | 700.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|------------|-----------------------|---|---|--|------------|----------------------|--|
| | | | Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | dan Tenaga Kerja | | Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 4 Dokumen | 647.800.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 4 Dokumen | 200.000.000 | |
| Biro Perekonomian | | | | | 30.537.706.000 | | | | | 3.283.479.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 83 Indeks | 3.273.833.610 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian | 83 Indeks | 1.000.182.496 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian) | 95% | 140.166.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian) | 95% | 99.816.000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 140.166.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 99.816.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian | 100% | 235.812.985 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian | 100% | 109.301.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|------------|-------------|--|
| | | | pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | | | | | pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 41 Paket | 58.417.500 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 45 Paket | 37.811.400 | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 3.914.500 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 5.489.600 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 41 Orang | 173.480.985 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 36 Orang | 66.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | 90% | 1.282.461.393 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | 90% | 550.905.130 | |
| | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Kab | Jumlah Paket Peralatan dan | 30 Paket | 66.088.925 | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Kab | Jumlah Paket Peralatan dan | 30 Paket | 48.091.904 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|---------------|--|---|---|------------|-------------|--|
| | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 18.354.500 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 11.024.890 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 31.171.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 21.935.654 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 7.831.300 | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130 Laporan | 1.159.015.668 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49 Laporan | 469.852.682 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|---------------|--|---|--|-----------|-------------|--|
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian) | 100% | 265.851.362 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian) | 100% | 194.129.716 | |
| | Pengadaan Mebel | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 22.197.653 | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | 243.653.709 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 194.129.716 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian) | 100% | 1.295.768.870 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian) | 100% | 7.661.650 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 20.078.510 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 7.661.650 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|---------|------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.275.690.360 | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian) | 100% | 53.773.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian) | 100% | 38.369.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 28.883.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 20.369.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 24.890.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 18.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|----------------|---|--|---|-----------|---------------|--|
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 27.263.872.390 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Kalimantan Timur | 1. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi | 100% | 2.283.296.504 | |
| | | | | | | | | 2. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi | 100% | | |
| | | | | | | | | 3. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi | 100% | | |
| | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 1.140.705.460 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 620.616.406 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 2 Dokumen | 758.710.152 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 2 Dokumen | 385.523.048 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|----------------|---|---|--|-----------|-------------|--|
| | | Kel/Desa | | | | | Kel/Desa | | | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Dokumen | 381.995.308 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 1 Dokumen | 235.093.358 | |
| | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 24.020.785.895 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 410.939.483 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 6 Dokumen | 23.456.860.916 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 3 Dokumen | 220.506.796 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 246.802.824 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 108.327.314 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | 2 Dokumen | 317.122.155 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | Semua Kota/Kab, Semua | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | 2 Dokumen | 82.105.373 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|---------------|---|--|--|---------------|---------------|--|
| | | Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kebijakan Energi dan Air | | | Energi dan Air | Kecamatan, Semua Kel/Desa | Kebijakan Energi dan Air | | | |
| | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Kalimantan Timur | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | 2.102.381.035 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Kalimantan Timur | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian | 100% | 1.251.740.615 | |
| | | | | | | | | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 100% | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 10 Dokumen | 1.181.621.705 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 10 Dokumen | 801.871.572 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Dokumen | 248.986.499 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Dokumen | 150.103.842 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|---|-----------|-----------------------|--|
| | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 1 Dokumen | 671.772.831 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 1 Dokumen | 299.765.201 | |
| Biro Administrasi Pembangunan | | | | | 13.005.000.000 | | | | | 21.602.256.793 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan | 85 Indeks | 5.493.219.651 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan | 85 Indeks | 1.327.927.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 100% | 247.400.390 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 100% | 187.360.000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 247.400.390 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 187.360.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Administrasi | 100% | 199.935.464 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|---------------|------------------------------------|------------------|---|-----|-------------|--|
| | | | Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | 84.885.464 | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 102.200.000 | | | | | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 12.850.000 | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 1.596.459.190 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 749.704.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------------|--|---|---|-----------|-------------|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 143.594.464 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 10.000.200 | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 1.442.864.526 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 719.704.600 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan) | 95% | 241.455.783 | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 241.455.783 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|---------------|---|---|---|------------|-------------|--|
| | | tan, Semua Kel/Des a | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 2.876.192.824 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 279.326.400 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 220.981.300 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 215.366.400 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.653.211.524 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 63.960.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|-------------|--|---|--|---------|-------------|--|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 331.776.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan) | 85% | 111.536.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 55.136.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 28.968.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 248.240.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 54.168.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 28.400.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 28.400.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------------|--|---|--|--|----------------|-----|
| | | Kel/Desa | | | | | Kel/Desa | | | | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Kalimantan Timur | Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah | 90% | 7.511.780.349 | | | 1. Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah | 86% | 20.274.329.793 | |
| | | | | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Kalimantan Timur | 2. Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan | 85% | | |
| | | | | | | | | 3. Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 85% | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 90% | 4.469.563.160 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 90% | 18.874.329.793 | |
| | | | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 90% | | | | | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | 90% |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 Laporan | 883.265.400 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 Laporan | 500.000.000 | |
| | Pengendalian | Semua | Jumlah Laporan | 4 | 584.497.760 | Pengendalian | Semua | Jumlah Laporan | 4 | 250.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|---------------|---|---|--|-----------|----------------|--|
| | Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Laporan | | Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Laporan | | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 3.001.800.000 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 18.124.329.793 | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 90% | 3.042.217.189 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 90% | 1.400.000.000 | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | 1 Dokumen | 552.800.000 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | 1 Dokumen | 400.000.000 | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah J | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Laporan | 1.249.246.198 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Laporan | 500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|------------|-----------------------|--|---|---|------------|----------------------|--|
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1.240.170.991 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 500.000.000 | |
| Biro Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 10.713.905.000 | | | | | 6.104.445.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 80 Indeks | 3.810.356.597 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Kalimantan Timur | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 85 Indeks | 1.839.292.522 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan | 90% | 141.373.353 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan | 90 % | 120.600.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 136.554.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 120.600.000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 4.819.353 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|-------------|---|------------------|---|----------|-------------|--|
| | | a | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 70% | 242.416.612 | Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) | 70% | 102.400.560 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 67.416.612 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 81.900.560 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 134.700.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 20.500.000 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 40.300.000 | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan | 86% | 884.606.405 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kalimantan Timur | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan | 86% | 765.942.942 | |
| | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Ka | Jumlah Paket Peralatan dan | 3 Paket | 193.735.200 | Penyediaan Peralatan dan | Semua Kota/Ka | Jumlah Paket Peralatan dan | 4 Paket | 140.976.918 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|-------------|--|---|---|------------|-------------|--|
| | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | Perlengkapan Kantor | b, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 49.345.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 27.200.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 641.526.205 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 597.766.024 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase prasarana kantor yang terpenuhi | 90% | 220.953.724 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kalimantan Timur | Persentase prasarana kantor yang terpenuhi | 90 Persen | 81.599.440 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 220.953.724 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 81.599.440 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|--|---|--|------------|-------------|--|
| | | a | | | | | a | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 86% | 2.166.407.503 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 86 Persen | 660.663.780 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11.884.424 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 7.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 198.664.700 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 180.507.780 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.955.858.379 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 472.656.000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kalimantan Timur | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 86% | 154.599.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Kalimantan Timur | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 86 Persen | 108.085.800 | |

| | | | | | | Daerah | | | | | |
|--|--|---|--|---------|---------------|--|---|--|---------|---------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 13.568.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 2.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 84.231.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 68.025.800 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 56.800.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 38.060.000 | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Kalimantan Timur | Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) | 3 Level | 6.903.548.403 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Kalimantan Timur | Tingkat Kematangan UKPBJ | 3 Level | 4.265.152.478 | |
| | | | Persentase Transaksi e- | 40% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------------|---|---|--|------------|---------------|--|
| | | | Purchasing Terhadap Pengadaan Pelalui Penyedia | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kalimantan Timur | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | 4 Variabel | 2.951.910.488 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kalimantan Timur | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | 4 Variabel | 1.839.604.000 | |
| | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 400.459.176 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Laporan | 202.732.000 | |
| | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 1.718.201.312 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 1.215.090.000 | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 833.250.000 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Laporan | 421.782.000 | |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kalimantan Timur | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan | 1 Variabel | 1.700.330.800 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kalimantan Timur | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan | 1 Variabel | 1.339.277.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------------|---|---|---|------------|---------------|--|
| | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 Laporan | 487.925.000 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 3 Laporan | 342.619.000 | |
| | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 604.076.800 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 603.670.200 | |
| | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 608.329.000 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 4 Laporan | 392.988.000 | |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kalimantan Timur | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan | 4 Variabel | 2.251.307.115 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kalimantan Timur | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan | 4 Variabel | 1.086.271.278 | |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 250 Orang | 815.327.900 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 300 Orang | 483.858.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|-------------|---|---|--|-----------|-------------|--|
| | | a | | | | | a | | | | |
| | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 791.575.900 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen | 273.224.638 | |
| | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 644.403.315 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Dokumen | 329.188.640 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Akan tetapi, pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, usulan tersebut merupakan masukan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirasa penting dan berasal dari Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 6
Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari Para Pemangku
Keperluan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|--|---|---|----------|------------|
| 1 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Sarimas RT.25 Gang Darul Amin Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 2 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan Batara Agung Dewa Sakti / Jalan Poros Kutai Lama RT.02, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 3 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan Padat Karya RT.11 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 4 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL. Poros Muara Badak Marang Kayu RT. 21 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|--|--|---|----------|------------|
| 5 | Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jalan kauman RT.02 Desa Bukit Raya, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 6 | Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN GUNUNG SARI RT 5, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 7 | Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN POROS RT 31, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 8 | Program Kesejahteraan Rakyat//Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN RAYA SAMARINDA SEBULU KM. 47, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 9 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JALAN DEWI SARTIKA RT 05 DUSUN RPAK REJO, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 10 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN POROS BUKIT PARIAMAN GANG BPP RT 15, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 11 | Program Kesejahteraan Rakyat/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | DUSUN KARYA JAYA RT 01, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 12 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN A. YANI NO 02 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------|
| 13 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JALAN KRISNA RT 05 DUSUN SIDO REJO, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 14 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN KAUMAN NO 5 RT 02 DUSUN SIDO DADI, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 15 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN SEPAYUNG DUSUN SUKA KARYA RT 09, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 16 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN SUKARAME RT 26 DUSUN SUKA MAJU, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 17 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JALAN FLAMBOYAN RT 18 L2, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 18 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN SADEWA BLOK C RT 12 DUSUN KARYA HARAPAN, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 19 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN LONG BAGUN RT 11, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 20 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN DR. SOETOMO DUSUN SIDO DADI RT 7, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 21 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN RAYA MULAWARMAN RT 08 BLOK F, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 22 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JALAN BELIDA I BLOK C NO 12 RT 031, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 23 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | RT 16 DUSUN BINA MULYA, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|---|---|-----------------|----------------|
| 24 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Samarinda-Anggana RT.12 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 25 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan Saamarinda No.194 Desa Sungai Mariam, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 26 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL. H. NURDIN, RT. 03, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 27 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. NARAS GUNAAQ, RT. 15, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 28 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jalan Raya Samarinda-Sebulu KM.47 Desa Suka Maju, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 29 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. H. M Ardans Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 30 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jln Ruhui Rahayu II GG. Perdamaian II RT 10 No 8, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 31 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL.TRANS KALIMANTAN NO.27 RT.001 KAMPUNG CEMPEDAS, KECAMATAN MUARALAWA, KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, 75575, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 32 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Padat Karya Perumahan Puspita Bengkuring, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|---|--|---|----------|------------|
| 33 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | RT.001 Sekolaq Darat , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 34 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Pembangunan RT.14 Desa Anggana, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 35 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. P. Suryanata, Komplek Graha Indah, Blok. AE. No. 1, Kota Samarinda, 75124, Provinsi Kalimantan Timur., Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 36 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JALAN A. YANI NO 02 RT 19, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 37 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | RT 02 DUSUN PANJI, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 38 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN ANGGREK RT 02, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 39 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | RT 21 DUSUN SUMBER JAYA, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 40 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. Pramuka RT. 002, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 41 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Sepingga Asri Utara VIII RT. 44 Kel. Sepingga Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------|
| 42 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Petinggi husaini RT.32 (Belakang Puskesmas Lamaru), Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 43 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Satu RT 14 No 56 A, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 44 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN AWANG LONG NO 53, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 45 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN PESUT GANG HM SALMAN RT 20, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 46 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JALAN TRUNOJOYO RT 04, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 47 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Banjar, Rt. 14, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 48 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Margabakti RT. 05 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 49 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL PADAT KARYA KM 8,5 RT 67 BLOK B NO. 11, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|---|--|---|----------|------------|
| 50 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL.NARAS GUNAAQ RT.013 KELURAHAN SIMPANG RAYA, KECAMATAN BARONG TONGKOK, KAB. KUTAI BARAT PROV. KALIMANTAN TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 51 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. provinsi km 18 Rt 06 kel. petung kec. Penajam, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 52 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan : Slamet Riyadi Gg.08 RT.041 No.05 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 53 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 54 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Slamet Riyadi No. 01 (Lt. 2), Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 55 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Ahmad Yani RT. 01 Gg Ghuan Barong Tongkok , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 56 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | YAYASAN PONDOK PESANTREN HIFZHIL QUR'AN (MA AL MUFID), Jl. Poros Bontang-Samarinda RT. 010 Dusun Gunung Kuari Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|---|---|---|----------|------------|
| 57 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | jalan karang jawa RT 07 NO 08 kelurahan karang jati kecamatan Balikpapan tengah, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 58 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL. SEKOLAHAN RT.003 KAMPUNG LINGGANG MAPAN ,KEC.LINGGANG BIGUNG , KAB. KUTAI BARAT, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 59 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Pembangunan, Rt 005, Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kutai Barat, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 60 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JLN. FLAMBOYAN RT 64 NO 35 BATU AMPAR LESTARI, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 61 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | PONDOK PESANTREN IHYA' ULUMUDDIN (TPQ IHYA' ULUMUDDIN), Jl. Mangga RT. 001 Dusun 1 Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 62 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. Siaga Dalam No 106 RT 37 Damai, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|---|---|-----------------|----------------|
| 63 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN IMAM BONJOL GANG LIKIT RT.015 KELURAHAN SIMPANG RAYA KEC. BARONG TONGKOK ,KAB. KUTAI BARAT, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 64 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JLN. MULAWARMAN RT. 53 NO.52 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 65 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL. MH THAMRIN GG. KELADI 2 RT.03 TANJUNG LIMAU, KEL. GUNUNG ELAI, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG., Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 66 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Kampung Muara Baroh RT. 001, Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 67 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. P. Hidayatullah RT. 02 Kelurahan Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 68 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Dr. Soewondo RT.IV Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 69 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Wonokitri Selatan RT.03 Kampung Sukomulyo Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 70 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | RT 002, Muara Leban, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 71 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JLN. S. PARMAN RT 19, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|---|--|---|----------|------------|
| 72 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan Basuki Rahmat No 42 Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75117, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 73 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Mangkujenang RT. 23 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 74 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | DUSUN DELTA MAHAKAM RT. 018 No. 001 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 75 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Marsma R. Ismahyudi RT 05 No 30 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 76 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jln. Panca Karya Kampung Siram Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 77 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Raya Simpang Budaya Rt. XV Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 78 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. KS TUBUN GG. VULKANIK 1A RT. 08, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 79 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Sopo Nyono RT.04 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 80 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. Padat Karya Pinang Seribu RT 40 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|---|---|---|----------|------------|
| 81 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Harmonika No. 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 82 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl P Hidayatullah RT 05 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 83 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Banggeris, Rt. 033 No. 30, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 84 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-HIKMAH, Jln. Hidayatulloh Gg. Hikmah RT.03 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 85 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-AMANAHA, Gang Prima RT.19 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 86 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-MAGFIROH, Jl. Ringroad RT.07 Gg. Berkah Kelurahan Singa Gaweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 87 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN SETIA RUNGKAQ RT.OI KAMPUNG JONTAI, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 88 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. PADAT KARYA RT. 16 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|----|--|--|---|----------|------------|
| 89 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jln. MT. Haryono (Ring Road) Gg. Al Auliya RT. 43, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 90 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL JANNAH, Jl. Yos Sudarso IV Gg. Musholla RT.20 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 91 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM USWATUN HASANAH, Desa Sangatta Selatan RT.03 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 92 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-MUNAWWAROH, Jl. Poros Kobo Gg. Karya Bakti 1 No.20 RT.13 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 93 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM ANNUR, Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 94 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM RAUDHATUL JANNAH, Desa Sangatta Selatan RT.02 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | CATATAN |
|-----|--|--|---|--------|------------|
| 95 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AR-RIDHO, Jl. Yos Sudarso IV Gg. Sankis RT.024 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 96 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM BABUSSALAM, Kelurahan Teluk Lingga RT.51 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 97 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM BAITURRAHIM, Kelurahan Teluk Lingga RT.02 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 98 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-AMIN, Kelurahan Teluk Lingga RT.16 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 99 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM AL-MUKARROMAH, Desa Sangatta Utara RT.64 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 100 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM DARUL AMAN, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|---|---|-----------------|----------------|
| 101 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | MAJELIS TA'LIM UKHUWAH ISLAMIAH, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 102 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jln. MT. Haryono (Ring Road) Gg. Al Auliya RT. 43, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 103 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Anggrek Desa Marga Mulya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 104 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Desa Persiapan Tepian Raya Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 105 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | GANG FAMILY 1A RT.23 NO.84 DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 106 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. DELIMA GG. DELIMA 2 RT.10 NO.48 DESA SINGA GEMBARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 107 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. YOS SUDARSO III GG. RAHMAT RT.034 RW.01 KELURAHAN TELUK LINGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 108 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jalan Bo Lawing Ubung RT.III, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----|---|---|---|----------|------------|
| 109 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN POROS SANGATTA - BONTANG KM 3 DUSUN BUKIT RAYA DESA PERSIAPAN PINANG RAYA KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 110 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Tepo Gang Darma Ayu No. 09 RT. 07, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 111 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN RAYA 99 RT.02 RESAK, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 112 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl Harmonika No. 1B RT 32, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 113 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Alamat : Jln. Ekonomi RT.13 Loa Buah Kec.Sungai Kunjang Samrinda, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 114 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. awanglong RT.15 Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 115 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. AW SYAHRANI DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 116 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jl. Mulawarman RT 018 Gang Setia 2, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------|
| 117 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Komplek PGRI RT.48, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 118 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JALAN MELATI RT 12 BLOK H, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 119 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Mook Manaar Bulatn, RT. 06, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 120 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. PEMBANGUNAN RT. 18 DUSUN MARGOMULYO, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 121 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. P. Suryanata, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 122 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Gerbang Dayaku RT.12 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 123 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Kapal layar 5 RT 20 Kel. Loktua, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 124 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jalan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 125 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jalan Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 126 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | KAMPUNG MENCIMAI KECAMATAN BARONG TONGKOK, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------|
| 127 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jln. Ra Erairiam RT.VI Kampung Long Iram Kota Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 128 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Basuki Rahmat, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 129 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jalan Polder Air Hitam RT 21, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 130 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Gg Musholla Km.13 RT 09 Desa Sangkiman, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 131 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jln Margo Santoso II RT 04, Pinang Raya, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 132 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Gg Santai RT 15, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 133 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Merdeka RE Martadinata Gg Mushola No 148 RT 019 Mekarsari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 134 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Poros Gunung Kapur No.02 RT.12 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 135 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. A.W. Syahrani Gang 3B RT. 35, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 136 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl.Widyagama RT.001 NO.09, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------|
| 137 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Mulyo Pranoto RT.06, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 138 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Jl. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 139 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL. AMD GURU BESAR RT.033 DUSUN III SINGA KARTI DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 140 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. REJO MULYO RT. 33, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 141 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Desa Lebaho Ulaq, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 142 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. MT Haryono Komp Balikpapan Baru Blok B2 RT.19 No. 08, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 143 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Mayjen Sutoyo RT 06, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 144 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Selamat 2 No. 132 RT. 06 Kelurahan Teluk Lingga, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|---|---|-----------------|----------------|
| 145 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | JL RA KARTINI RT 030, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 146 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | YAPIA Al-Azhar, Jl. M. Said RT 12 Lok Bahu, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 147 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Kapal Selam 3 RT.15 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 148 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. DI Panjaitan Gg. Piano 4 RT. 03 Kel. Bontang Baru, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 149 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. KENANGAN NO. 16 RT. 21 , Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 150 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | JL. D. I PANJAITAN NO. 17 RT. 80, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 1 | Biro Kesra |
| 151 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Brigjen Katamso GB Pakis RT.17 Kel. Gn. Elai, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 152 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Otista RT. 24 Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 153 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Kaktus Blok E No.14 Perum Griya Wisata RT.14 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 154 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jalan Kadrie Oening RT 31 No 06 Gang Raspen, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|---|---|---|-----------------|----------------|
| 155 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Siradj Salman Perum Grand Mutiara Blok. D No. 2 RT.29, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 156 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | DESA SINGA GEMBARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 157 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Ir. Juanda RT.06 Kel. Tanjung Laut, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 158 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | jl.KH.Wahid HASyim Gg. Papadaan RT. 024, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 159 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. Habibon RT 26. Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 160 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Makassar RT.22 Kel. Gn. Telihan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 161 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jl. Letjen. S. Parman RT 04, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 1 | Biro Kesra |
| 162 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | JL. PEPAYA 3 PALARAN BUKUAN, SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 163 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Sidrap No.05 RT.020 Kel. Guntung, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 164 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. RE. Martadinata RT.04 Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VO LU ME | CATATAN |
|-----------|--|--|---|-----------------|----------------|
| 165 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Selamat Riyadi RT.09 Kel. Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |
| 166 | Program Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual/Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jl. Kapal Selam 1 RT. 19 Loktuan, Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 1 | Biro Kesra |

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

BAB III

Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025–2029 memperlihatkan adanya penekanan pada penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif. Namun, dalam konteks Sekretariat Daerah, tidak terdapat pemetaan langsung program dan kegiatan yang secara eksplisit diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, sebagaimana berlaku pada perangkat daerah teknis melalui forum rakortekrenbang. Hal ini disebabkan karena fungsi Sekretariat Daerah lebih bersifat koordinatif, fasilitatif, dan administratif, sehingga kontribusinya terhadap prioritas nasional tidak ditunjukkan melalui kegiatan teknis sektoral, melainkan melalui penguatan tata kelola dan dukungan manajerial terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, peran Sekretariat Daerah dalam kerangka mendukung RPJMN lebih ditekankan pada penciptaan sistem koordinasi yang efektif, perumusan kebijakan yang responsif, serta pelayanan administratif yang akuntabel. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting agar program dan kegiatan perangkat daerah lain dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah tetap terkoneksi dengan tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

3.1.2 Telaahan Terhadap prioritas Provinsi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD 2025–2029 telah merumuskan berbagai prioritas strategis yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah. Prioritas tersebut tidak hanya mencerminkan arah

kebijakan makro, tetapi juga menuntut peran aktif perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah, dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sejalan dengan dinamika lingkungan strategis.

Sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD mencakup penguatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing, penanggulangan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata serta berkelanjutan. Di samping itu, terdapat pula fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan bencana. Keseluruhan sasaran ini menunjukkan bahwa pembangunan Kalimantan Timur diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun untuk Sekretariat Daerah, prioritas tersebut memiliki implikasi penting dalam hal peningkatan kualitas kebijakan, koordinasi administratif, serta penyediaan layanan birokrasi yang efektif. Hal ini menuntut adanya responsivitas, kreativitas, dan inovasi dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan kebutuhan riil daerah. Sekretariat Daerah juga dituntut menjadi penghubung strategis yang mampu memastikan keterpaduan antarperangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendorong efektivitas pembangunan. Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026 yang mendukung Sepuluh Prioritas Daerah dapat dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

**Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026
yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah**

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|-----------|--|---|--|---|
| 1 | Terakselerasinya Perekonomian Daerah | Program : Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|---|--|--|---|
| | | Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 2 | Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 3 | Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|---|--|--|---|
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 4 | Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|------------------|---|--|---|
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|------------------|--|---|---|
| | | | | Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|------------------|--|---|---|
| | | Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa | Tingkat Kematangan UKPBJ | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|---|--|--|---|
| | | Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 5 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|-----------|--|--|---|---|
| 6 | Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 7 | Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan non pelayanan dasar di bidang kesra | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 8 | Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|--|--|---|---|
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 9 | Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan | Program Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, |

| No | Prioritas Daerah | Program/ kegiatan/ subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Lokasi Kegiatan |
|----|---|--|--|---|
| | | | | Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Program Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapannya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |

Sumber Data: Sekretariat Daerah, diolah

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat mengampu dan mendukung 2 (Dua) dari 7 (Tujuh) Program Unggulan Gratispol yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu:

1. Gratis Kuliah S1-S3, Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat melanjutkan kuliah Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktoral (S3) secara gratis. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah melalui pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikerjasamakan dengan institut dan universitas;
2. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah, Merupakan kegiatan unggulan yang memberikan kesempatan dan penghargaan bagi setiap imam (atau dengan sebutan lainnya) serta penjaga rumah ibadah untuk dapat menunaikan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) secara gratis. Kelompok sasaran kegiatan unggulan ini adalah para imam (atau dengan sebutan lainnya) dan penjaga rumah ibadah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah/lembaga/yayasan rumah ibadah setempat serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Instrumen utama kegiatan unggulan ini adalah pembiayaan penuh biaya perjalanan ibadah umroh (perjalanan suci atau dengan sebutan lainnya) oleh pemerintah. Melalui kegiatan unggulan ini, diharapkan akan semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai modal terwujudnya kehidupan yang rukun, damai dan toleran.

Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat juga mengampu dan mendukung 1 (Satu) dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Jospol dan arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim

Sukses, yaitu Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah, merupakan penghargaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengabdian masyarakat, sekaligus mendorong kualitas pendidikan dan kehidupan beragama. Guru sekolah umum dan pesantren dapat diberikan tunjangan kinerja, insentif khusus, serta pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi. Sementara itu, penjaga rumah ibadah juga perlu mendapat perhatian melalui pemberian insentif rutin sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan. Melalui meningkatkan insentif ini diharapkan motivasi dan kinerja para pendidik serta penjaga rumah ibadah akan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan beragama yang harmonis di Kalimantan Timur.

Berikut Tabel Program Unggulan Kepala Daerah yang diampu Sekretariat Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.2

Program Unggulan Kepala Daerah yang Diampu oleh Sekretariat Daerah

| No | Prioritas Daerah | Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan yang mendukung Prioritas Provinsi | No | Target/ Sasaran Penerima Manfaat | Pagu (Rp) | Program Unggulan |
|----|--|---|--|----|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | 1 | 158.981 orang penerima program beasiswa pendidikan gratis (S1, S2, S3) | 1.377.861.500.000 | Gratispol |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 2 | 36.946 orang penerima insentif guru | 121.843.500.000 | Jospol |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------|-----------|
| 2 | Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat | Program Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra | 1 | 930 orang penerima manfaat perjalanan religi (umrah/religi nasional) | 32.550.000.000 | Gratispol |
| | | Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi | | | | |
| | | Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 2 | 4.800 orang penerima manfaat insentif untuk penjaga rumah ibadah lintas agama | 28.800.000.000 | Jospol |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | | | | |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu

“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berperan penting dalam mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan **misi ke-4, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.**

Dalam kerangka misi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki fungsi strategis sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan, yang meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan program lintas perangkat daerah, serta pemberian dukungan administratif dan pelayanan teknis pemerintahan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan

demikian, keberadaan Sekretariat Daerah tidak hanya menjadi pusat koordinasi, tetapi juga penjamin integrasi kebijakan, efektivitas birokrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin efektif, profesional, dan berintegritas dengan dukungan teknologi informasi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan dukungan teknis pemerintahan;
3. Meningkatnya integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

| No | Tujuan dan Sasaran | Indikator | Realisasi 2024 | Baseline Target 2025 | Target 2026 |
|----|--|--|----------------|----------------------|-------------|
| | Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah | Indeks Kualitas Kebijakan | 55.75 | 55.00 | 60.00 |
| 1 | Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah | Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang di Tindaklanjuti | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|--------|
| 2 | Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Rancangan | Indeks Reformasi Hukum | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
| 3 | Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Capaian Aksi HAM | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 4 | Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | | Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Sasaran V : Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase pelaksanaan program dan kegiatan unggulan daerah yang sesuai dengan target waktu dan capaian fisik | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 8 | Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 9 | Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Organisasi yang dibentuk | Indeks Kematangan Organisasi | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 10 | | Jumlah Perangkat Daerah klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) | 0.00 | 0.00 | 5,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|-------|
| 11 | | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 12 | Sasaran VIII: Meningkatkan Kualitas layanan umum dan rumah tangga KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah | Indeks kepuasan pengguna layanan terhadap layanan umum dan rumah tangga KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah | 0.00 | 0.00 | 86,5 |
| 13 | Sasaran IX: Meningkatkan Kepatuhan Tindaklanjut Peningkatan Kualitas SAKIP Sekretariat Daerah | Persentase Hasil Rekomendasi evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah yang di Tindaklanjuti | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 14 | Sasaran X: Meningkatkan Kualitas layanan administrasi, dokumentasi, dan protokoler | Tingkat kepuasan Pengguna Layanan terhadap layanan administrasi, dokumentasi, dan protokoler | 0.00 | 0.00 | 82.00 |

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (sembilan puluh delapan) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- k. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 3) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
- l. Fasilitasi Keprotokolan
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
 - 2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

3. Program Penataan Organisasi

- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - 2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 3) Penataan Analisis Jabatan
- b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 2) Fasilitasi Penataan Wilayah
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah- langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

**PENCAPAIAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | BIRO UMUM | | | | | | 360.448.340.000,00 | | | | | | | 245.123.893.001,40 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 360.448.340.000,00 | | | | | | | 245.123.893.001,40 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 360.448.340.000,00 | | | | | | | 245.123.893.001,40 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 360.448.340.000,00 | | | | | | - | 245.123.893.001,40 | |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Umum] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 | 84 | 84.50 | 85 | 360.448.340.000,00 | - | - | - | - | - | - | 245.123.893.001,40 | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum) | - | | | 100 % | 129.746.035.493,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 118.974.316.647,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 683 Orang/Bulan | 127.531.930.492,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 116.596.019.394,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 2.214.105.001,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 2.378.297.253,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum)</i> | - | | | 100 % | 1.327.219.334,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 1.413.572.077,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 672.055.704,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 689.988.816,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 655.163.630,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 723.583.261,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum</i> | - | | | 100 % | 3.129.732.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 3.603.762.800,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 9 Paket | 910.356.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 926.655.400,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> | | | | 4 Dokumen | 1.688.376.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 1.780.286.200,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 45 Orang | 531.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Internal Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 896.821.200,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum</i> | - | | | 100 % | 49.663.003.086,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | - | 30.312.165.195,40 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 494.919.126,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 312.125.970,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 486.242.399,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 562.642.017,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 321 Paket | 21.700.320.894,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 8.960.480.760,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 772.471.805,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 587.112.695,40 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 12 Laporan | 4.499.307.600,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 1.781.714.919,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 20.503.473.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 16.949.670.320,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | | | | 4 Dokumen | 904.944.360,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 834.125.204,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 4 Dokumen | 301.323.252,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan, Pengguna Layanan Sekretariat Daerah, dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 324.293.310,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</i> | - | | | 100 % | 17.645.733.849,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | - | 4.273.712.739,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 4 Unit | 6.155.453.024,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 380.919.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 330 Unit | 9.990.486.999,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 2.864.049.562,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 55 Unit | 1.499.793.826,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 1.028.744.177,00 | BIRO UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</i> | - | | | 100 % | 57.563.921.014,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | - | 37.508.056.377,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 49.560.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 54.516.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 11.667.948.600,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 13.457.620.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 7.136.705.850,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 2.613.121.412,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 38.709.706.564,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pengguna Layanan Sekretariat Daerah dan Internal Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 21.382.798.965,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</i> | - | | | 100 % | 42.155.222.470,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | - | 17.997.294.660,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 66 Unit | 1.369.400.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 502.002.600,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 262 Unit | 4.821.094.390,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 4.625.715.600,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 250 Unit | 187.500.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 1.167.404.550,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 13 Unit | 33.585.117.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 11.541.186.910,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 147 Unit | 2.192.111.080,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 160.985.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | - | | | 100 % | 17.889.134.675,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 13.850.233.577,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/Bulan | 250.252.236,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 275.277.455,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 452.928.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 209.550.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 8 Orang | 869.040.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 931.392.000,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/ Bulan | 16.316.914.439,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 12.434.014.122,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | <i>Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</i> | - | | | 100 % | 41.328.338.079,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim | - | 17.190.778.929,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 15 Paket | 26.001.840.575,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 6.555.262.843,00 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 11.512.130.851,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 6.604.664.138,00 | BIRO UMUM | |
| | 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i> | | | | 23 Paket | 3.814.366.653,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Pengguna Layanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim | | 4.030.851.948,00 | BIRO UMUM | |
| | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | | | | | | | 21.418.239.000,00 | | | | | | | 19.360.715.133,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 21.418.239.000,00 | | | | | | | | 19.360.715.133,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 21.418.239.000,00 | | | | | | | | 19.360.715.133,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 21.418.239.000,00 | | | | | | - | | 19.360.715.133,00 | |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 83 86 | - 82 | - 83.5 | 81 84 | 21.418.239.000,00 | - | - | - | - | - | - | 19.360.715.133,00 | - | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 1.507.234.673,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah | - | 1.206.525.375,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 6 Dokumen | 916.684.673,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah | | 763.531.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 5 Laporan | 590.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Biro di Lingkup Sekretariat Daerah | | 442.994.375,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 179.880.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang Jasa | - | 4.741.229.973,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 1 Dokumen | 179.880.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang Jasa | | 4.741.229.973,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 1.820.604.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | - | 630.118.200,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> | | | | 2 Dokumen | 673.404.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | | 356.118.200,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 68 Orang | 1.147.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | | 274.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 2.255.900.362,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn | - | 2.042.860.626,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 30 Paket | 240.561.182,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn | | 289.648.626,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 50 Paket | 177.955.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn | | 172.500.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 40.384.180,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn | | 40.362.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 2 Laporan | 1.797.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan, Para Tamu Biro Administrasi Pimpinn | | 1.540.350.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 369.910.186,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | - | 407.042.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 32 Unit | 369.910.186,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | | 407.042.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 16.329.600,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | - | 21.328.210,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 16.329.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan | | 21.328.210,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</i> | - | | | 90 % | 245.400.848,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | - | 179.530.870,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 8 Unit | 198.260.848,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | | 167.586.050,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i> | | | | 1 Laporan | 5.258.967.725,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya, Masyarakat Umum | | 3.629.293.234,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i> | | | | 3 Laporan | 5.674.743.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya, Masyarakat Umum | | 3.172.646.965,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | <i>Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan</i> | - | | | 100 % | 3.493.108.486,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya | - | 2.687.998.040,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i> | | | | 1 Laporan | 1.352.526.605,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya | | 1.533.134.920,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 1 Laporan | 1.152.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya | | 747.820.620,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i> | | | | 2 Laporan | 987.981.881,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Pimpinan Daerah Pemprov Kaltim, Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kaltim, Lembaga Vertikal dan Organisasi Lainnya | | 407.042.500,00 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | | BIRO HUKUM | | | | | | | 3.951.487.000,00 | | | | | | 4.944.704.988,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 3.936.487.000,00 | | | | | | | 4.872.704.988,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 3.936.487.000,00 | | | | | | | 4.872.704.988,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 421.775.838,00 | | | | | | - | 1.357.993.706,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|-----|----|----|----------------|---|---|---|---|---|------------------|---|
| | | [Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 89 | 100 | 89 | 87 | 421.775.838,00 | - | - | - | - | - | 1.357.993.706,00 | - |
|--|--|---|---|----|-----|----|----|----------------|---|---|---|---|---|------------------|---|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik</i> | - | | | 100 % | 95.760.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 95.760.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 95.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 95.760.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | - | | | 100 % | 7.680.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 8.122.808,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 7.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 8.122.808,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i> | - | | | 100 % | 306.775.718,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 306.775.718,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 50 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 30.000.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 7 Paket | 8.635.718,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 8.635.718,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 268.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 268.140.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | - | | | 100 % | 120,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 134.693.884,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 801.081.296,00 | BIRO HUKUM |
| | | [Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Hukum] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 89 | 100 | 89 | 87 | 421.775.838,00 | - | - | - | - | - | - | 1.357.993.706,00 | - |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i> | - | | | 100 % | 8.560.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 8.560.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 12 Unit | 8.560.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 8.560.000,00 | BIRO HUKUM |
| 2. | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | 3.514.711.162,00 | | | | | | - | 3.514.711.282,00 | |
| | | [Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum yang dihasilkan, dan penyelesaian masalah hukum] | Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.514.711.162,00 | - | - | - | - | - | - | 3.514.711.282,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.05.1.01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | <i>Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah</i> | - | | | 100 % | 1.899.496.202,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | - | 1.899.496.322,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i> | | | | 80 Dokumen | 640.315.554,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 640.315.554,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i> | | | | 750 Dokumen | 205.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 205.400.000,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya</i> | | | | 800 Dokumen | 400.342.888,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 400.342.888,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i> | | | | 350 Dokumen | 653.437.760,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 653.437.880,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | <i>Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan</i> | - | | | 100 % | 1.615.214.960,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | - | 1.615.214.960,00 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i> | | | | 10 Kasus | 1.149.982.232,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 1.149.982.232,00 | BIRO HUKUM |
| | | - | - | - | - | - | - | 3.514.711.162,00 | - | - | - | - | - | - | 3.514.711.282,00 | - |
| | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i> | | | | 5 Kasus | 465.232.728,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Prov. Kaltim dan Stakeholder terkait | | 465.232.728,00 | BIRO HUKUM |
| | X | NON URUSAN | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 72.000.000,00 | |
| | X.XX | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 72.000.000,00 | |
| 1. | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | - | 72.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i> | - | | | 100 % | 15.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas. | - | - | - | 72.000.000,00 | BIRO HUKUM | |
| | X.XX.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 1 Orang | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas. | - | - | | 72.000.000,00 | BIRO HUKUM | |
| | | BIRO ORGANISASI | | | | | | | 4.343.462.000,00 | | | | | | | 6.912.156.447,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 4.343.462.000,00 | | | | | | | 6.912.156.447,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 4.343.462.000,00 | | | | | | | 6.912.156.447,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---|------------------|--|
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 886.478.489,00 | | | | | | - | 1.439.914.000,00 | |
|----|---------|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---|------------------|--|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 92 | 100 | - | 88 | 886.478.489,00 | - | - | - | - | - | - | 1.439.914.000,00 | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi) | - | | | 100 % | 103.329.510,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | - | 115.440.200,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 103.329.510,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 115.440.200,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | - | | | 100 % | 3.600.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | - | 10.230.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 3.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 10.230.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)</i> | - | | | 95 % | 662.939.199,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | - | 1.039.573.800,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 9 Paket | 72.153.331,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 37.473.800,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 78.089.248,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 278.350.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 17.096.620,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 16.500.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 495.600.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 707.250.000,00 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)</i> | - | | | 100 % | 43.797.780,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | - | 194.076.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 3 Unit | 43.797.780,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 194.076.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)</i> | - | | | 100 % | 72.812.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | - | 80.594.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 6 Unit | 52.312.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 61.812.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 16 Unit | 20.500.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim | | 18.782.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| 2. | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | 3.456.983.511,00 | | | | | | - | 5.472.242.447,00 | |
| | | [Meningkatnya Hasil Kematangan Organisasi Perangkat Daerah] | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi | 75 | 10.26 | - | 63 | 3.456.983.511,00 | - | - | - | - | - | - | 5.472.242.447,00 | - |
| | 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi</i> | - | | | 40 PD | 1.744.304.631,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | - | 2.122.242.447,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|---|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i> | | | | 3 Dokumen | 410.840.997,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 410.840.997,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i> | | | | 2 Dokumen | 911.401.450,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 911.401.450,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i> | | | | 1 Dokumen | 422.062.184,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 800.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | | [Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah] | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Perdiklat Minimal BB (Sangat Baik) | 85.00 | 95.69 | - | 82.00 | 3.456.983.511,00 | - | - | - | - | - | - | 5.472.242.447,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya</i> | - | | | 40 PD 40 PD | 1.712.678.880,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | - | 3.350.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i> | | | | 1 Dokumen | 300.004.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | 950.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i> | | | | 1 Dokumen | 341.170.330,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | 950.000.000,00 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja</i> | | | | 1 Laporan | 175.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | 300.000.000,00 | BIRO ORGANISASI | |
| | | [Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah] | Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) | 95 | 82 | - | 86 | 3.456.983.511,00 | - | - | - | - | - | - | 5.472.242.447,00 | - | |
| | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i> | | | | 1 Dokumen | 307.336.881,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | 530.000.000,00 | BIRO ORGANISASI | |
| | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i> | | | | 1 Dokumen | 589.167.669,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | 620.000.000,00 | BIRO ORGANISASI | |
| | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | | 9.026.204.000,00 | | | | | | | 14.264.348.411,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 9.026.204.000,00 | | | | | | | 14.264.348.411,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 9.026.204.000,00 | | | | | | | 14.264.348.411,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.337.161.880,00 | | | | | | - | 2.477.112.725,00 | |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 90 | 85 | 87 | 87 | 1.337.161.880,00 | - | - | - | - | - | - | 2.477.112.725,00 | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan Biro POD | - | | | 95 % | 122.400.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | - | 140.520.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 2 Dokumen | 122.400.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 140.520.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD | - | | | 100 % | 17.180.100,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | - | 50.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 7 Orang | 17.180.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 50.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Biro POD</i> | - | | | 100 % | 1.009.672.780,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | - | 2.211.346.725,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 30 Paket | 63.822.130,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 105.093.925,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 43.650.650,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 63.452.800,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 902.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 2.042.800.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD</i> | - | | | 100 % | 123.820.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | - | 8.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 8.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 118.820.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 0,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)</i> | - | | | 100 % | 64.089.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | - | 67.246.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 9 Unit | 51.269.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 54.312.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 18 Unit | 12.820.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim | | 12.934.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| 2. | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | 7.689.042.120,00 | | | | | | - | 11.787.235.686,00 | |
| | | [Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)] | Persentase Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaporkan | 100 | - | 100 | 100 | 7.689.042.120,00 | - | - | - | - | - | - | 11.787.235.686,00 | - |
| | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | <i>Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan</i> | - | | | 100 % | 2.687.202.120,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | - | 5.265.524.620,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.01.0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i> | | | | 3 Dokumen | 2.286.329.920,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 4.765.524.620,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | [Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan] | Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan | 100 | - | 100 | 100 | 7.689.042.120,00 | - | - | - | - | - | - | 11.787.235.686,00 | - |
| | 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i> | | | | 3 Dokumen | 400.872.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 500.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | [Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Otonomi Daerah] | Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah | 100 | - | 100 | 100 | 7.689.042.120,00 | - | - | - | - | - | - | 11.787.235.686,00 | - |
| | 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | <i>Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah</i> | - | | | 100 % | 3.801.840.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | - | 4.256.557.018,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i> | | | | 3 Dokumen | 417.665.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 450.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan</i> | | | | 3 Dokumen | 2.682.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 3.106.557.018,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | [Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah] | Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.689.042.120,00 | - | - | - | - | - | - | 11.787.235.686,00 | - |
| | 4.01.03.1.02.0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i> | | | | 3 Laporan | 701.475.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 700.000.000,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | | [Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kerja Sama] | Persentase Kerjasama Daerah yang di Tindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.689.042.120,00 | - | - | - | - | - | - | 11.787.235.686,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | <i>Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti</i> | - | | | 100 % | 1.200.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | - | 2.265.154.048,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i> | | | | 30 Dokumen | 623.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 999.998.340,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi</i> | | | | 20 Dokumen | 239.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 472.239.568,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi</i> | | | | 3 Laporan | 338.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur | | 792.916.140,00 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | |
| | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | 1.772.971.544.000,00 | | | | | | | 3.469.000.000,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 1.772.971.544.000,00 | | | | | | | 3.469.000.000,00 | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 1.772.971.544.000,00 | | | | | | | 3.469.000.000,00 | | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.376.265.139,00 | | | | | | - | 1.769.000.000,00 | | |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 95 | 100 | - | 85 | 1.376.265.139,00 | - | - | - | - | - | - | 1.769.000.000,00 | - | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)</i> | - | | | 95 % | 427.760.000,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | - | 330.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 12 Dokumen | 406.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 308.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 21.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 22.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)</i> | - | | | 100 % | 32.178.000,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | - | 37.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 4 Orang | 32.178.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 37.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---------------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-----------|--------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)</i> | - | | | 12 Bulan | 785.912.539,00 | | | - | - | seluruh pegawai di biro kesra | - | 1.208.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 38 Paket | 139.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | seluruh pegawai di biro kesra | | 250.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 29.260.929,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | seluruh pegawai di biro kesra | | 60.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 617.651.610,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | seluruh pegawai di biro kesra | | 898.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat)</i> | - | | | 12 Bulan | 10.000.000,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | - | 20.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 20.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)</i> | - | | | 100 % | 120.414.600,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | - | 174.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 13 Unit | 100.322.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 134.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---------|---------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 18 Unit | 20.092.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat | | 40.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
|--|--|--|---|--|--|--|---------|---------------|---|---|---|---|--|--|---------------|---------------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--|-----------|--------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | 1.771.595.278.861,00 | | | | | | - | 1.700.000.000,00 | |
| | | [Meningkatnya kapasitas lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan] | Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra | 6.495 | - | - | 5.715 | 1.771.595.278.861,00 | - | - | - | - | - | - | 1.700.000.000,00 | - |
| | 4.01.04.1.01 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | <i>Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi</i> | - | | | 100 % | 138.185.860.000,00 | | | - | - | Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya | - | 1.700.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i> | | | | 300 Unit | 11.242.860.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya | | 1.000.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i> | | | | 10 Lembaga | 126.943.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA | - | - | Masyarakat Umum, Lembaga, dan Organisasi lainnya | | 700.000.000,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|---------|---|---|---------|----------------------|---|---|---|---|--|------------------|------|---------------------------|
| | | [Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar] | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra | 223.553 | - | - | 198.900 | 1.771.595.278.861,00 | - | - | - | - | - | 1.700.000.000,00 | - | |
| | 4.01.04.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | - | | | 100 % | 1.631.809.418.861,00 | | | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | - | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|---|-----------|--------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 4 Dokumen | 1.631.409.418.861,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | [Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar] | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi | 100 | 100 | - | 100 | 1.771.595.278.861,00 | - | - | - | - | - | - | 1.700.000.000,00 | - |
| | 4.01.04.1.03 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti | - | | | 100 % | 1.600.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | - | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|-----------|----------------|---|---|---|---|--|--|------|---------------------------|
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i> | | | | 4 Dokumen | 700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-----------|------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i> | | | | 4 Dokumen | 700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i> | | | | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI DAERAH - LRA, DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | | 0,00 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | BIRO PEREKONOMIAN | | | | | | | 3.283.479.000,00 | | | | | | 29.572.350.224,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 3.283.479.000,00 | | | | | | 29.572.350.224,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | 3.283.479.000,00 | | | | | | 29.572.350.224,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | 1.000.182.496,00 | | | | | | 1.631.423.656,00 | |
| | | [Meningkatkan Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 | 100 | 82 | 83 | 1.000.182.496,00 | - | - | - | - | - | - | 1.631.423.656,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|--|------|---------------|--|--|---|---|---|---|----------------|-------------------|
| 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian) | - | | | 95 % | 99.816.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 162.712.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Dokumen | 99.816.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 162.712.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | - | | | 100 % | 109.301.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 243.735.800,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|--|----------|---------------|--|--------------------------|---|---|---|--|----------------|-------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 45 Paket | 37.811.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 112.804.450,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | | | | 12 Dokumen | 5.489.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 4.278.450,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 36 Orang | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 126.652.900,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)</i> | - | | | 90 % | 550.905.130,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 1.026.211.308,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 30 Paket | 48.091.904,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 32.588.458,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 11.024.890,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 19.062.450,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 21.935.654,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 34.298.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 49 Laporan | 469.852.682,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 940.262.400,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)</i> | - | | | 100 % | 194.129.716,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 113.039.887,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 15 Unit | 194.129.716,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 113.039.887,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</i> | - | | | 100 % | 7.661.650,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 22.086.361,00 | BIRO PEREKONOMIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 1 Laporan | 7.661.650,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 22.086.361,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</i> | - | | | 100 % | 38.369.000,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | - | 63.638.300,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 1 Unit | 20.369.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 33.091.300,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 20 Unit | 18.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim | | 30.547.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 2. | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | 2.283.296.504,00 | | | | | | - | 27.940.926.568,00 | |
| | | [Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kebijakan Perencanaan (Ekonomi Makro dan Mikro)] | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perencanaan (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi | 100 | 90 | - | 100 | 2.283.296.504,00 | - | - | - | - | - | - | 27.940.926.568,00 | - |
| | 4.01.06.1.01 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan | <i>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan yang difasilitasi</i> | - | | | 100 % | 620.616.406,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | - | 1.143.710.152,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i> | | | | 2 Dokumen | 385.523.048,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 758.710.152,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i> | | | | 1 Dokumen | 235.093.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 385.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | [Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam] | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi | 100 | - | - | 100 | 2.283.296.504,00 | - | - | - | - | - | - | 27.940.926.568,00 | - |
| | 4.01.06.1.02 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | <i>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi</i> | - | | | 100 % | 410.939.483,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | - | 24.162.287.173,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i> | | | | 3 Dokumen | 220.506.796,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 23.456.860.916,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i> | | | | 2 Dokumen | 108.327.314,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 290.597.780,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i> | | | | 2 Dokumen | 82.105.373,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 414.828.477,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | [Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah] | Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi | 100 | 100 | - | 100 | 2.283.296.504,00 | - | - | - | - | - | - | 27.940.926.568,00 | - |
| | 4.01.06.1.03 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | <i>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian</i> | - | | | 100 % 100 % | 1.251.740.615,00 | | | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | - | 2.634.929.243,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i> | | | | 10 Dokumen | 801.871.572,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 1.585.562.728,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i> | | | | 1 Dokumen | 150.103.842,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 359.366.515,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</i> | | | | 1 Dokumen | 299.765.201,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 690.000.000,00 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | | 21.602.256.793,00 | | | | | | 13.130.645.915,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 21.602.256.793,00 | | | | | | | 13.130.645.915,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 21.602.256.793,00 | | | | | | | 13.130.645.915,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.327.927.000,00 | | | | | | - | 5.025.311.764,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 | 100 | - | 85 | 1.327.927.000,00 | - | - | - | - | - | - | 5.025.311.764,00 | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | - | | | 100 % | 187.360.000,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | - | 260.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 187.360.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | | 260.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | - | | | 85 % | 749.704.600,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | - | 4.148.594.464,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | | 143.594.464,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 719.704.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | | 4.005.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) | - | | | 85 % | 279.326.400,00 | | | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | - | 284.941.300,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 215.366.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | | 220.981.300,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 63.960.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pegawai di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan | | 63.960.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)</i> | - | | | 85 % | 111.536.000,00 | | | - | - | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | - | 331.776.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 28.968.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | | 55.136.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 5 Unit | 54.168.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | | 248.240.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 40 Unit | 28.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, Peralatan/Perlengkapan Mesin Kantor | | 28.400.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2. | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | 20.274.329.793,00 | | | | | | - | 8.105.334.151,00 | |
| | | [Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah] | <i>Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah</i> | 90 | 80 | - | 86 | 20.274.329.793,00 | - | - | - | - | - | - | 8.105.334.151,00 | - |
| | 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | <i>Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i> | - | | | 90 % 90 % | 18.874.329.793,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | - | 4.885.363.160,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i> | | | | 4 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 954.665.400,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i> | | | | 4 Laporan | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 630.697.760,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah] | Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan | 88 | - | - | 85 | 20.274.329.793,00 | - | - | - | - | - | - | 8.105.334.151,00 | - |
| | 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 6 Laporan | 18.124.329.793,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 3.300.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | [Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan] | Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 88 | - | - | 85 | 20.274.329.793,00 | - | - | - | - | - | - | 8.105.334.151,00 | - |
| | 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | | | 90 % | 1.400.000.000,00 | | | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | - | 3.219.970.991,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 650.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 1.250.000.000,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Stakeholder terkait | | 1.319.970.991,00 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | 6.104.445.000,00 | | | | | | 13.340.731.757,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 6.104.445.000,00 | | | | | | | 13.340.731.757,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 6.104.445.000,00 | | | | | | | 13.340.731.757,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.839.292.522,00 | | | | | | - | 4.408.781.054,00 | |
| | | [Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa] | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 87 | 100 | 84 | 85 | 1.839.292.522,00 | - | - | - | - | - | - | 4.408.781.054,00 | - |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan | - | | | 90 Persen | 120.600.000,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 136.554.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 12 Dokumen | 120.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 136.554.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)</i> | - | | | 70 % | 102.400.560,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 184.900.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 1 Paket | 81.900.560,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 0,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 10 Orang | 20.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 184.900.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan</i> | - | | | 86 Persen | 765.942.942,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 944.013.830,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 140.976.918,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 193.735.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 27.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 49.369.730,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 12 Laporan | 597.766.024,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 700.908.900,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase prasarana kantor yang terpenuhi</i> | - | | | 90 Persen | 81.599.440,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 2.436.208.900,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 40 Unit | 81.599.440,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 2.436.208.900,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | - | | | 86 Persen | 660.663.780,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 514.476.324,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 7.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 11.884.424,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 180.507.780,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 199.184.700,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 472.656.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 303.407.200,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | - | | | 86 Persen | 108.085.800,00 | | | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | - | 192.628.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 13.568.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 2 Unit | 68.025.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 122.260.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 40 Unit | 38.060.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Biro PBJ Setda Prov. Kaltim | | 56.800.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | 4.265.152.478,00 | | | | | | - | 8.931.950.703,00 | |
| | | [Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa] | Tingkat Kematangan UKPBJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.265.152.478,00 | - | - | - | - | - | - | 8.931.950.703,00 | - |
| | 4.01.07.1.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan | - | | | 4 Variabel | 1.839.604.000,00 | | | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | - | 3.911.195.488,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 3 Laporan | 202.732.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 417.849.176,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 4 Laporan | 1.215.090.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 2.495.400.312,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 3 Laporan | 421.782.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 997.946.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan | - | | | 1 Variabel | 1.339.277.200,00 | | | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | - | 2.259.112.600,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | | | | 3 Laporan | 342.619.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 815.673.800,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1 Laporan | 603.670.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 604.086.800,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 4 Laporan | 392.988.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 839.352.000,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-----------------------|-----------|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.07.1.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | <i>Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan</i> | - | | | 4 Variabel | 1.086.271.278,00 | | | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | - | 2.761.642.615,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 300 Orang | 483.858.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 869.315.900,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 3 Dokumen | 273.224.638,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 1.185.339.400,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 2 Dokumen | 329.188.640,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) | - | - | Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | 706.987.315,00 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | JUMLAH | | | | | | | | 2.203.149.456.793,00 | | | | | | 350.118.545.876,40 | |

BAB V **Penutup**

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan RENJA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009